



NASIONAL

Biaya Fantastis, Jokowi Disebut Sengaja Tinggalkan Istana Megah untuk Gibran di IKN

Oleh Redaksi · 15 Okt, 21.53 WIB



BANDA ACEH - Pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan anggaran Rp1,7 triliun menjadi sorotan sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D.

Ia mempertanyakan urgensi pembangunan istana khusus wakil presiden sekaligus menyinggung perhatian Presiden ke-7 RI Joko

Widodo terhadap proyek tersebut menjelang akhir masa jabatannya.

Pandangan itu disampaikan Sulfikar dalam diskusi bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada 15 Oktober 2026. Dalam perbincangan tersebut, keduanya membahas besarnya anggaran pembangunan Istana Wapres dan kaitannya

dengan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Sulfikar menilai pembangunan istana khusus untuk wakil presiden berlebihan. Ia membandingkan fasilitas kepresidenan di Indonesia dengan Amerika Serikat, yang menggunakan Gedung Putih sebagai pusat kegiatan presiden dan wakil presiden.

Menurut dia, keberadaan fasilitas kerja wakil presiden dalam

kompleks yang sama dengan presiden dapat menjadi pertimbangan untuk menilai kebutuhan pembangunan istana tersendiri di IKN.

"Pembangunan Istana Wapres ini agak berlebihan. Apalagi kalau kita lihat secara arsitektural jauh lebih elegan dibanding istana yang didesain sesuai dengan selera Jokowi ...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

INTERNASIONAL

Hitung Riwayat Pendidikan Gibran, Sosiolog Singapura Sebut Hanya Setara SMP Plus



BANDA ACEH - Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan setelah sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., menjelaskan perbedaan sistem pendidikan Singapura dan Indonesia.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada 15 Oktober 2026, Sulfikar menjelaskan ...

[Selengkapnya di halaman 18 »](#)

NASIONAL

Reshuffle Jilid 8, Ada Apa di Balik Pertukaran Posisi Tandyo dan Maruli?



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran pejabat negara dalam Reshuffle Kabinet Jilid VIII.

Kali ini sorotan utama tertuju pada pertukaran posisi dua jende-

ral bintang empat TNI Angkatan Darat: Jenderal Tandyo Budi Revita dan Jenderal Maruli Simanjuntak.

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
INTERNASIONAL	17
Aneka Berita	19

NASIONAL

Adhie Massardi: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Moralitas Bangsa Dinilai Nyaris Nol



BANDA ACEH - Tokoh yang dikenal sebagai mantan juru bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, melontarkan kritik keras terhadap kondisi moralitas bangsa selama 10 tahun pemerin-

tahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai persoalan moral menjadi sangat penting ketika hukum dan Politik berhadapan dengan perkara ...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

INTERNASIONAL

Parlemen Malaysia Ancam Gugat Indonesia Gegara Kabut Asap, Tuntut Kompensasi



BANDA ACEH - Anggota Parlemen dari Bagan, Lim Guan Eng, mendesak Malaysia untuk mempertimbangkan langkah hukum terhadap Indonesia guna menuntut kompensasi atas krisis kabut asap lintas batas yang kian memburuk.

Tuntutan itu dinilai perlu dilakukan jika Jakarta menolak untuk bekerja sama dalam pembentukan satuan tugas (satgas) permanen ASEAN ...

[Selengkapnya di halaman 17 »](#)

NASIONAL

Gus Lilur Laporkan Dugaan Jual Beli Suara Mukhtar NU ke KPK



BANDA ACEH - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur ternyata sudah melaporkan dugaan Politik uang atau riswah dalam pelaksanaan Mukhtar ke-35 NU kepada

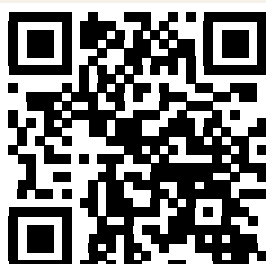
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan jual beli suara yang menurut Gus Lilur diduga bersumber ...

[Selengkapnya di halaman 6 »](#)

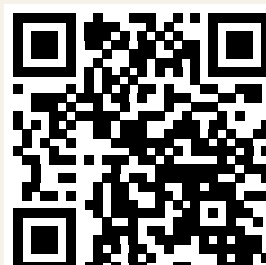
BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

35 BERITA

NASIONAL

Biaya Fantastis, Jokowi Disebut Sengaja Tinggalkan Istana Megah untuk Gibran di IKN

Oleh Redaksi · 15 Okt, 21.53 WIB



BANDA ACEH - Pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan anggaran Rp1,7 triliun menjadi sorotan sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D.

Ia mempertanyakan urgensi pembangunan istana khusus wakil presiden sekaligus menyinggung perhatian Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap proyek tersebut menjelang akhir masa jabatannya.

Pandangan itu disampaikan Sulfikar dalam diskusi bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada 15 Oktober 2026. Dalam perbincangan tersebut, keduanya membahas besarnya anggaran pembangunan Istana Wapres dan kaitannya dengan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Sulfikar menilai pembangunan istana khusus untuk wakil presiden berlebihan. Ia membandingkan fasilitas kepresidenan di Indonesia dengan Amerika Serikat, yang menggunakan Gedung Putih sebagai pusat kegiatan presiden dan wakil presiden.

Menurut dia, keberadaan fasilitas kerja wakil presiden dalam kompleks yang sama dengan presiden dapat menjadi pertimbangan untuk menilai kebutuhan pembangunan istana tersendiri di IKN.

"Pembangunan Istana Wapres ini agak berlebihan. Apalagi kalau kita lihat secara arsitektural jauh lebih elegan dibanding istana yang didesain sesuai dengan selera Jokowi yang ada burung kelelawarnya kata netizen," ungkap Sulfikar.

Selain menyoroti desain dan anggaran, Sulfikar memperhatikan perkembangan pembangunan Istana Wapres pada penghujung masa pemerintahan Jokowi. Ia menduga proyek tersebut mendapat perhatian khusus karena Gibran akan menempati fasilitas itu setelah menjabat sebagai wakil presiden.

"Sepertinya kalau saya perhatikan di akhir-akhir masa jabatannya, Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap pembangu-

nan Istana Wapres. Mungkin pikir, 'Oh, anak saya sebentar lagi akan mendiami itu', kan 1,7 triliun coba untuk biaya itu," papar Sulfikar.

Pernyataan tersebut merupakan dugaan dan penilaian Sulfikar mengenai perhatian Jokowi terhadap proyek pembangunan Istana Wapres. Dalam diskusi itu, ia mengaitkan besarnya anggaran dan posisi Gibran dengan kemungkinan adanya pertimbangan Politik keluarga di balik pembangunan fasilitas tersebut.

Sulfikar juga mengkritik orientasi pembangunan yang menekankan warisan fisik atau legacy pemerintahan. Menurut dia, pembangunan gedung monumental dengan biaya besar perlu dipertimbangkan berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.

Ia berpandangan, anggaran Rp1,7 triliun untuk Istana Wapres seharusnya menjadi bagian dari pembahasan lebih luas mengenai prioritas belanja negara. Kebutuhan infrastruktur publik dan pemerataan pembangunan di ber-

bagai daerah, menurut dia, juga perlu mendapat perhatian.

Sulfikar turut mempertanyakan pembangunan istana megah di kawasan ibu kota baru yang belum sepenuhnya berkembang. Ia menilai keputusan tersebut berpotensi menimbulkan beban anggaran bagi pemerintahan berikutnya.

Meski demikian, dugaan bahwa Istana Wapres secara khusus disiapkan untuk Gibran merupakan interpretasi Sulfikar dalam diskusi tersebut. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tujuan khusus Jokowi dalam pembangunan proyek senilai Rp1,7 triliun tersebut.

Perdebatan mengenai Istana Wapres IKN pada akhirnya mencakup persoalan kebutuhan fasilitas negara, besarnya anggaran pembangunan, dan prioritas penggunaan uang publik. Penilaian terhadap proyek itu perlu membedakan antara fakta anggaran dan pembangunan dengan dugaan mengenai motif politik di baliknya.

NASIONAL

Adhie Massardi: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Moralitas Bangsa Dinilai Nyaris Nol

Oleh Redaksi · 15 Okt, 20.52 WIB



Joko Widodo alias Jokowi. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Tokoh yang dikenal sebagai mantan juru bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, melontarkan kritik keras terhadap kondisi moralitas bangsa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai persoalan moral menjadi sangat penting ketika hukum dan Politik berhadapan dengan perkara yang menyangkut kepemimpinan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Adhie ketika menyoroti persoalan legal standing atau kedudukan hukum dalam gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Adhie, perkara yang menyangkut figur pemimpin nasional tidak seharusnya hanya dipandang dari sisi formalitas hukum. Ia memperkenalkan istilah moral standing, yakni kedudukan moral yang menurut pandangannya dimiliki masyarakat ketika mempertanyakan integritas seorang pemimpin.

"Nah, tetapi menyangkut figur pemimpin nasional dan ini untuk seluruh rakyat Indonesia, maka legal standing di situ harus sudah gugur dengan sendirinya. Kawan-kawan itu ketika masuk ke situ statusnya sudah menjadi moral standing," ujar Adhie di podcast Obor Rakyat Reborn, Kamis (15/10/2026).

Ia menilai persoalan legal standing dalam perkara tersebut justru menjadi tembok penghalang bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan.

Menurut dia, ketika perkara menyangkut kepentingan publik, pengadilan semestinya memberikan perhatian serius terhadap substansi persoalan yang diperdebatkan.

Adhie juga mengkritik sikap hakim yang, menurutnya, tidak semestinya menyerahkan persoalan keadilan di dunia kepada pengadilan akhirat.

"Urusan pengadilan akhirat urusan Tuhan. Kalian enggak usah ikut campur. Kalian tugas kalian menegakkan keadilan di muka bumi," katanya.

Adhie berpandangan, perdebatan mengenai moralitas tidak

dapat dipisahkan dari kualitas penegakan hukum dan praktik politik.

Ia mengkhawatirkan masyarakat semakin permisif terhadap persoalan integritas sehingga tidak lagi mempunyai standar moral yang tegas dalam menilai pemimpin maupun orang-orang yang mendukungnya.

"Ketika moralnya jatuh, hukum dan politiknya menjadi tidak ada manfaatnya," tegas Adhie.

Dalam kritiknya, Adhie turut menyinggung perjalanan pemerintahan Jokowi selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024.

Ia menilai persoalan moralitas menjadi salah satu hal mendasar yang harus dievaluasi dari periode pemerintahan tersebut.

"Kenapa moral tidak penting? Karena 10 tahun pemerintahan Bapak Gibran ini, moralitas bangsa ini, moralitas para pendukungnya kan hampir boleh dibilang zero," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kritik politik Adhie. Klaim mengenai merosotnya moralitas bangsa bukan ukuran statistik yang dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh masyarakat atau pendukung pemerintahan Jokowi memiliki moralitas rendah.

Pernyataan Adhie tersebut berkaitan dengan polemik putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam perkara tersebut, Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Akibatnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

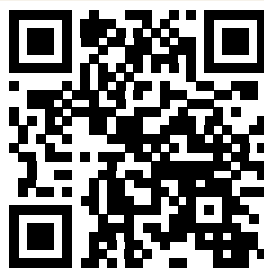
Namun, terdapat bagian pertimbangan putusan yang turut menjadi perhatian publik. MK menyebutkan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Reshuffle Jilid 8, Ada Apa di Balik Pertukaran Posisi Tandyo dan Maruli?

Oleh Redaksi · 15 Okt, 20.25 WIB



Pelantikan pertukaran posisi dua jenderal bintang empat TNI Angkatan Darat: Jenderal Tandyo Budi Revita dan Jenderal Maruli Simanjuntak. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran pejabat negara dalam Reshuffle Kabinet Jilid VIII.

Kali ini sorotan utama tertuju pada pertukaran posisi dua jenderal bintang empat TNI Angkatan Darat: Jenderal Tandyo Budi Revita dan Jenderal Maruli Simanjuntak.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore. Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI sejak 10 Agustus 2025 dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Sementara Maruli yang sebelumnya menjabat KSAD sejak November 2023 diangkat menjadi Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).

Pengangkatan keduanya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 105 dan 106 TNI Tahun 2026. Prosesi dipimpin langsung Prabowo, yang juga memandu sumpah jabatan.

Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Siapa Tandyo dan Maruli?

Jenderal Tandyo Budi Revita lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 dari kecabangan Infanteri (Kostrad).

Jejak kariernya mencakup jabatan tempur dan staf, termasuk Danbrigif Linud 17/Kujang I, Pangdam IV/Diponegoro (2023–2024), Wakasad, hingga Wakil Panglima TNI.

Ia juga pernah menjabat di Kementerian Pertahanan (Kabadi-klat, Direktur Bela Negara, dan Direktur Kerja Sama Pertahanan).

Jenderal Maruli Simanjuntak lahir 27 Februari 1970, lulusan Akmil 1992 dari Kopassus. Ia pernah menjabat Danpaspampres, Pangdam IX/Udayana, Pangkos-trad, lalu KSAD.

Maruli dikenal sebagai menantu Luhut Binsar Pandjaitan (menikah dengan Paulina Pandjaitan). Ber-

dasarkan LHKPN, kekayaannya dilaporkan sekitar Rp81,1 miliar (bersih setelah utang).

Usai dilantik, Tandyo menyatakan prioritasnya mempercepat program strategis pemerintahan yang melibatkan TNI AD, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Maruli menegaskan akan mendukung tugas Panglima TNI sekaligus fokus pada pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil, termasuk mengoptimalkan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dan dukungan TNI AU.

Apa di Balik Pertukaran Posisi?

Pertukaran ini memunculkan spekulasi di kalangan pengamat dan anggota DPR, terutama terkait kemungkinan regenerasi kepemimpinan puncak TNI.

Menurut Pasal 13 UU TNI (sebagaimana diubah UU Nomor 3 Tahun 2025), Panglima TNI

harus perwira tinggi aktif bintang empat yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan (Darat, Laut, atau Udara). Jabatan Wakil Panglima saja tidak memenuhi syarat tersebut.

Sebelumnya Tandyo belum pernah menjabat KSAD, sehingga belum memenuhi kriteria.

Dengan dilantik sebagai KSAD, ia kini memenuhi syarat. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mencatat bahwa dari Angkatan Darat kini ada dua perwira yang memenuhi syarat: Maruli (sebagai Wapang yang pernah KSAD) dan Tandyo (KSAD baru).

"Bisa sinyal, bisa tidak. Ya, nanti kita tunggu dua bulan ke depan," ujar TB Hasanuddin, seraya menekankan bahwa pengangkatan Panglima adalah hak prerogatif Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.

Tandyo sendiri enggan berko-mentar jauh. "Itu domain Presiden," katanya saat ditanya soal isu calon Panglima.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Beda Nasib Suharyanto dan Nusron Wahid: Satu Dicopot Usai OTT, Satu Ditunggu KPK!

Oleh Redaksi · 15 Okt, 19.14 WIB



JAKARTA – Pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan pertanyaan serius tentang konsistensi pertanggungjawaban pejabat publik.

Di tengah kasus yang menyeret adik Suharyanto sebagai tersangka, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid masih ditunggu kehadirannya untuk diperiksa KPK dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya.

Sementara Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Suharyanto dari kursi Kepala BNPB pada Kamis (15/10/2026). Posisinya kini dijabat Letjen TNI Kristomei Sianturi, yang dilantik di Istana Negara, Jakarta.

Pergantian itu terjadi dua hari setelah KPK menggelar OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai kebencanaan tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Bima Setiawan, adik Suharyanto.

Meski demikian, pencopotan Suharyanto tidak serta-merta membuktikan dirinya terlibat dalam perkara korupsi tersebut.

Namun, momentum pergantian pucuk pimpinan BNPB di tengah pengusutan kasus itu membuka ruang pertanyaan mengenai tanggung jawab pimpinan ketika perkara hukum menyeret orang-orang di lingkaran lembaganya.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menduga pergantian Suharyanto berkaitan dengan perkara yang menjerat adiknya. Ia menilai kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu ditelusuri berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.

"Korupsi itu memang tidak bisa dilepaskan dari kolusi dan nepotisme (KKN). Jadi dasar alat bukti sedikitnya dua alat bukti sudah bisa dibuktikan ada atau tidak keterlibatan orang lain atau bahkan anggota keluarga," kata Fickar kepada

Monitorindonesia.com, Kamis (15/10/2026).

Lima tersangka dalam perkara tersebut terdiri atas Bima Setiawan, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG.

Fickar tidak menutup kemungkinan penyidik menelusuri pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik rasuah tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat yang memiliki hubungan dengan para tersangka.

Namun, penetapan status hukum terhadap seseorang harus didasarkan pada kecukupan alat bukti. "Sangat mungkin ada pihak lain yang mendapat keuntungan, dan tidak tertutup kemungkinan juga Kepala BNPB, karena keterlibatan adiknya sekarang sudah diganti," ungkapnya.

Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

"Siapun yang berdasarkan alat bukti ternyata tersangkut dan terlibat melakukan Tipikor mempunyai tanggung jawab pidana, termasuk Kepala BNPB jika terbukti ada aliran dana masuk, bahkan juga bisa berubah menjadi tersangka," tegasnya.

Suharyanto Diganti, Nusron Masih Ditunggu KPK

Situasi berbeda terlihat dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta.

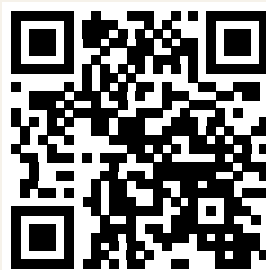
KPK masih menunggu kehadiran Nusron Wahid untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan praktik jual beli jabatan dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

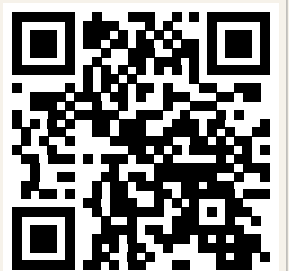
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Daftar Lengkap Reshuffle Kedelapan Kabinet Prabowo 15 Oktober 2026: 9 Pejabat Dilantik

Oleh Redaksi · 15 Okt, 18.52 WIB



Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kamis (15/10/2026). FOTO/Net.

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kamis (15/10/2026). Ini merupakan reshuffle kabinet kedelapan sejak Prabowo menjabat Presiden pada Oktober 2024.

Pelantikan ini hanya berjarak 14 hari setelah reshuffle ketujuh yang sebelumnya dilakukan Prabowo pada Kamis, 1 Oktober lalu.

Prabowo melantik sembilan pejabat negara di sejumlah posisi strategis, mulai dari jajaran TNI, kementerian, serta lembaga pemerintahan non-kementerian.

Sembilan pejabat yang dilantik terdiri atas Wakil Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), dua Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Wamen Imipas), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Di lingkungan TNI, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang

sebelumnya menjabat KSAD dilantik sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.

Sementara Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI kini menjabat KSAD. Keduanya bertukar posisi dari jabatan sebelumnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memperkuat jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan melantik dua wakil menteri baru, yakni Marsenal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wamenhan Bidang Logistik Industri Pertahanan dan Teknologi, serta Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wamenhan Bidang Strategi Doktrin dan Pembangunan Kekuatan.

Prabowo juga melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB yang sebelumnya dijabat Jenderal TNI (Purn) Suharyanto, sejak 17 November 2021.

Daftar lengkap 9 pejabat yang dilantik Prabowo pada 15 Oktober 2026:

- Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
- Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
- Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon menjabat Wakil Menteri Pertahanan bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
- Marsenal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi.
- Alim Setiawan Slamet menjabat Wakil Menteri Pertanian.
- M Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.
- Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
- Mayjen TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola

Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Pengangkatan sembilan pejabat tersebut berdasarkan pada sejumlah keputusan presiden (keppres). Pelantikan Jenderal Tandyo dan Jenderal Maruli berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 105 dan 106 TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil serta Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Sementara pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih merujuk pada Keppres Nomor 42/M Tahun 2026 dan pelantikan kepala dan wakil kepala BPGMN berdasarkan Keppres Nomor 43/M Tahun 2026.

Diketahui, reshuffle hari ini, 15 Oktober 2026 merupakan perombakan kabinet kedelapan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Mahfud MD: 3 Menteri Diduga Ikut Kondisikan Aturan Pencalonan Gibran

Oleh Redaksi · 15 Okt, 21.31 WIB



Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti dugaan pengondisian aturan pemilu yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Ia mengungkap adanya informasi mengenai dugaan arahan dari tiga menteri untuk memastikan persoalan persyaratan pendidikan tidak menghambat pencalonan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Mahfud menyampaikan hal itu dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary. Ia merujuk pada podcast yang dipandu mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto, yang disebut menghadirkan narasumber anonim atau mystery guest.

Menurut Mahfud, narasumber tersebut merupakan mantan pejabat tinggi yang diklaim mengetahui dan menyaksikan adanya arahan terkait proses pencalonan Gibran.

“Ada sebuah podcast menarik dari Bambang Widjojanto yang mengundang mystery guest, mantan pejabat tinggi yang tahu dan menyaksikan bahwa ada tiga menteri yang memerintahkan kondisikan kemenangan Gibran,” kata Mahfud dikutip pada Kamis (15/10/2026).

Meski demikian, identitas narasumber maupun tiga menteri yang dimaksud belum diungkap secara terbuka dalam keterangan tersebut.

Klaim itu juga belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang terbukti karena masih memerlukan verifikasi melalui bukti dan keterangan pihak-pihak terkait.

Mahfud turut menyoroti PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat 3 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia mengaitkan ketentuan tersebut dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran menjelang Pilpres 2024.

“Jangan terhalang karena ijazah, maka dibuat pasal itu,” ujar Mahfud, menirukan substansi arahan yang menurutnya disampaikan dalam informasi tersebut.

Pencalonan Gibran sebelumnya juga menjadi kontroversi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023.

Putusan itu membuka pengecualian terhadap batas usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Gibran yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Surakarta kemudian dapat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Kontroversi semakin menguat karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran, ikut menangani perkara tersebut.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik berat dan mencopotnya dari jabatan ketua MK.

Mahfud menilai dugaan pengondisian regulasi perlu ditelusuri karena menyangkut integritas pembentukan aturan dan penyelenggaraan pemilu.

Ia mengancam keras praktik manipulasi aturan apabila dugaan tersebut terbukti.

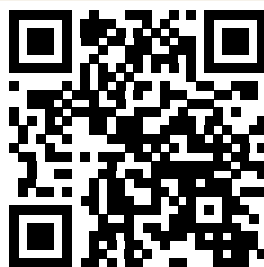
“Ini sebenarnya kejahatan moral yang luar biasa dan merusak peradaban. Kita bernegara, negara hukum, negara demokrasi yang sudah kita bangun 80 tahun lebih dirusak hanya karena menggiatkan aturan,” ujar Mahfud.

Ia mendesak agar dugaan manipulasi dalam penyusunan atau penerbitan aturan KPU diusut, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran pidana. Namun, pembuktian tetap memerlukan penelusuran dokumen, keterangan saksi, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang diduga terkait.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

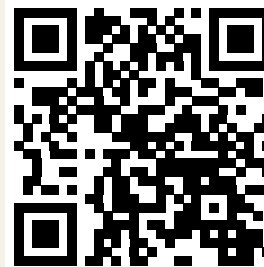
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Aus Hidayat Nur: Putusan MK soal Gibran Jangan Jadi Bom Waktu

Oleh Redaksi · 15 Okt, 16.32 WIB



BANDA ACEH - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dibaca sebagai momentum untuk memperbaiki sistem penerimaan dan verifikasi calon kepala daerah maupun calon kepala negara.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA. MK juga menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga lain yang berwenang.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Aus Hidayat Nur mengatakan terlepas dari polemik yang berkembang, ada

pelajaran penting yang harus kita ambil.

"Persyaratan calon pejabat publik harus diverifikasi secara cermat sejak awal. Jangan sampai persoalan mendasar terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen baru menjadi polemik berkepanjangan setelah proses pemilu selesai dan pejabat terpilih dilantik. Sistem kita masih memiliki celah yang rawan memicu kegaduhan publik," ujar Aus Hidayat Nur, Kamis, 15 Oktober 2026.

Menurut Aus, catatan MK tersebut harus segera dijawab melalui perbaikan regulasi, terlebih pembahasan RUU Pemilu sedang dipersiapkan.

Ia mendorong adanya standar verifikasi faktual atas dokumen pendidikan calon serta kejelasan status surat keterangan penyetaan dibandingkan dengan ijazah.

"Syarat pencalonan tidak boleh hanya berhenti pada kelengkapan administrasi. Harus ada kepastian bahwa dokumen yang menjadi dasar kelulusan benar-benar terve-

rifikasi, siapa pun calonnya dan di level jabatan apa pun," katanya.

Aus juga menyoroti relasi antara KPU dan Bawaslu yang terungkap dalam persidangan. Bawaslu menyampaikan bahwa akses pengawasannya terhadap dokumen calon terbatas, antara lain akun Silon yang tidak dapat digunakan untuk mengakses data calon, sementara KPU menyampaikan tidak melakukan pengecekan langsung karena telah menerima surat keterangan.

"Ketika pengawas tidak memiliki akses yang memadai dan penyelenggara tidak melakukan pengecekan langsung, maka fungsi saling kontrol tidak berjalan. Perlu ada sistem yang menengahi apabila KPU dan Bawaslu berbeda penilaian, termasuk akses data yang setara dan mekanisme verifikasi bersama," tegasnya.

Lebih lanjut, Aus menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa administratif tidak berhenti pada ketukan palu MK. Terkait putusan MK yang menyerahkan urusan

keabsahan administratif dan implikasi lanjutannya kepada lembaga negara lain yang berwenang, DPR RI siap mengambil peran tersebut secara serius.

"Karena MK menyerahkan ranah administrasi ini ke lembaga terkait, maka DPR RI harus dan akan menindaklanjuti putusan ini. Kami tidak ingin urusan keabsahan dokumen dasar seperti ini terus-menerus menjadi bom waktu yang menguras energi bangsa," jelas Aus.

Aus mengajak semua pihak menjadikan putusan ini sebagai pelajaran bersama demi pemilu dan pilkada yang lebih berkualitas.

"Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dibangun dari kepastian hukum dan transparansi. Fraksi PKS akan mengawal agar perbaikan sistem pencalonan ini benar-benar masuk dalam agenda legislasi kita," pungkasnya.

NASIONAL

Soroti Polemik Dokumen Pendidikan Gibran, PKS Desak Perketat Verifikasi Calon Pejabat

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.11 WIB



BANDA ACEH -Komisi II DPR RI menyoroti polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang kembali memanaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kalangan legislatif mendesak agar sistem verifikasi persyaratan calon pejabat publik diperketat guna mencegah polemik serupa berulang di masa mendatang.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, polemik keabsahan dokumen pendidikan semestinya dapat dicegah jika proses verifikasi dilakukan secara cermat sejak awal. Jangan sampai persoalan mendasar terkait persyaratan pencalonan baru menjadi perdebatan setelah pemilu selesai dan pejabat terpilih dilantik.

"Sistem kita masih memiliki celah yang rawan memicu kegaduhan publik," ujar Aus kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Sebelumnya, melalui putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Dalam pertimbangannya, MK menyampaikan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan tingkat SMA, sekaligus menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga berwenang lainnya.

Aus menilai, catatan MK harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan pembentuk undang-undang, terlebih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tengah dipersiapkan.

"Syarat pencalonan tidak boleh hanya berhenti pada kelengkapan administrasi. Harus ada kepastian bahwa dokumen yang menjadi dasar kelulusan benar-benar terverifikasi, siapa pun calonnya dan di level jabatan apa pun," katanya.

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu juga menyoroti mekanisme pengawasan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam persidangan, Bawaslu menyampaikan keterbatasan akses terhadap dokumen calon melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sementara KPU disebut tidak melakukan pengecekan langsung karena telah menerima surat keterangan.

"Ketika pengawas tidak memiliki akses yang memadai dan penyelenggara tidak melakukan pengecekan langsung, maka fungsi saling kontrol tidak berjalan. Perlu ada sistem yang menengahi apabila KPU dan Bawaslu berbeda penilaian, termasuk akses data yang setara dan mekanisme verifikasi bersama," tegasnya.

Aus menegaskan, persoalan administrasi pencalonan yang menjadi perhatian dalam putusan MK harus ditindaklanjuti melalui pembenahan regulasi dan penguatan pengawasan. Ia menilai DPR perlu memastikan adanya mekanisme verifikasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Karena MK menyerahkan ranah administrasi ini ke lembaga terkait, maka DPR RI harus dan akan menindaklanjuti putusan ini. Kami tidak ingin urusan keabsahan dokumen dasar seperti ini terus-menerus menjadi bom waktu yang menguras energi bangsa," jelas Legislator PKS ini.

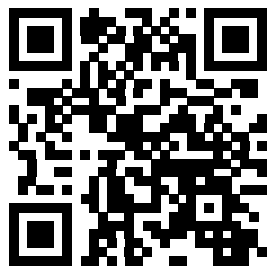
Ia memastikan Fraksi PKS akan mengawal agar pembenahan sistem pencalonan masuk dalam agenda legislasi, sehingga persyaratan pendidikan calon pejabat publik dapat diverifikasi secara lebih ketat dan memberikan kepastian hukum.

"Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dibangun dari kepastian hukum dan transparansi. Fraksi PKS akan mengawal agar perbaikan sistem pencalonan ini benar-benar masuk dalam agenda legislasi kita," pungkasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

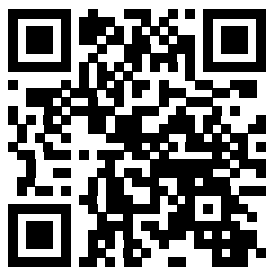
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Ketua KPK Peringatkan Nusron Wahid Jika Absen Dipanggilan Kedua, Mungkinkah Dijemput Paksa?

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.25 WIB



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (15/10/2026), setelah Nusron tidak memenuhi panggilan pertama pada 7 Oktober lalu.

Pemanggilan ulang ini menjadi momentum bagi KPK untuk menggali keterangan dari Nusron, terutama guna memperjelas konstruksi perkara yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan pihak swasta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta Nusron memenuhi panggilan penyidik. Hingga Rabu (14/10/2026), KPK mengaku belum menerima pemberitahuan mengenai kemungkinan ketidakhadiran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.

Setyo juga mengingatkan komitmen Nusron yang sebelumnya

menyatakan akan mendukung proses penegakan hukum oleh KPK.

Menurutnya, kehadiran Nusron diperlukan agar penyidik dapat memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penanganan perkara.

"Masalah substansi, materi pemeriksaan, dan keterangan yang dibutuhkan itu prosesnya nanti berjalan kalau yang bersangkutan sudah hadir," kata Setyo di Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa substansi pemeriksaan baru dapat digali setelah Nusron hadir di hadapan penyidik. KPK membutuhkan keterangannya untuk memperjelas sejumlah aspek dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut.

Absen Panggilan Pertama

Pada pemeriksaan pertama, 7 Oktober 2026, Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan dan mengirimkan surat panggilan kedua.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyatakan harapannya agar Nusron memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan yang diperlukan penyidik.

"Kami meyakini pada saatnya nanti yang bersangkutan akan hadir kooperatif, memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan," ujar Budi.

KPK kini menunggu realisasi kehadiran Nusron sesuai jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Sikap kooperatif menjadi penting agar proses penyidikan dapat berjalan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut bisa diperjelas.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menanggapi kemungkinan apabila Nusron kembali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Ia menyatakan KPK memiliki mekanisme yang dapat dipertimbangkan, tetapi belum mengungkapkan langkah spesifik yang akan ditempuh.

"Ya, nanti tentu ada mekanisme atau strategi yang dilakukan oleh penyidik," katanya.

Meski demikian, Setyo tetap berharap Nusron hadir sesuai jadwal. Hingga Rabu (14/10/2026), belum ada pengumuman mengenai tindakan tertentu yang akan diambil jika pemeriksaan kembali tidak terlaksana.

Pemanggilan Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Lampri, I Son-tang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adhi, Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Gus Lilur Laporkan Dugaan Jual Beli Suara Mukhtar NU ke KPK

Oleh Redaksi · 15 Okt, 08.01 WIB



BANDA ACEH - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur ternyata sudah melaporkan dugaan Politik uang atau riswah dalam pelaksanaan Mukhtar ke-35 NU kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan jual beli suara yang menurut Gus Lilur diduga bersumber dari dana hasil korupsi yang diduga melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Gus Lilur mengaku mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Kedatangannya membawa dua agenda utama, yakni melaporkan dugaan praktik suap dalam Mukhtar NU dan mengoordinasikan pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan praktik riswah.

"Agar beberapa PCNU yang mau mengembalikan dana riswah bisa langsung diterima penyidik KPK, dan uang riswahnya bisa langsung disita oleh penyidik KPK," kata Gus Lilur kepada wartawan, Rabu 14 Oktober 2026.

Ia menegaskan, laporan yang disampaikan pada tahap awal belum secara khusus menetapkan atau memidanakan individu tertentu sebagai pelaku. Laporan tersebut, kata dia, bertujuan memaparkan dugaan rangkaian peristiwa, pola transaksi, pihak-pihak yang disebut terlibat, hingga lokasi penyerahan uang.

"Dalam LP Tipikor ini saya belum memidanakan secara khusus para pelaku riswah Mukhtar," ujarnya.

Gus Lilur menduga rangkaian transaksi diawali dengan pengumpulan puluhan pengurus cabang NU di sejumlah ibu kota provinsi.

"Ada tiga hal yang diduga menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Salah satunya adalah arahan untuk memilih paket sembilan nama calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA)," kata dia.

Kedua, Gus Lilur menduga terdapat arahan untuk mendukung mekanisme pemilihan melalui AHWA atau restu Rais Aam, dengan tetap menghadirkan lebih dari satu calon Ketua Umum.

Ketiga, pertemuan tersebut diduga membahas lokasi pelunasan uang muka, yakni Hotel Fatma di Jombang dan posko Nusron Wahid di Jalan Teuku Cik Ditiro, Desa Pulo Lor, Jombang.

Gus Lilur mengungkapkan, dugaan pemberian uang berlangsung melalui tiga tahapan.

Tahap pertama diduga berupa pembayaran uang muka melalui mobilisasi pengurus wilayah NU ke sejumlah hotel di Bengkulu, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta beberapa daerah di Sulawesi.

Tahap kedua diduga berlangsung menjelang Mukhtar NU di sejumlah hotel di Surabaya. Sementara tahap ketiga disebut berupa pelunasan yang diduga berlangsung di Jombang.

"Demikianlah tiga tahapan yang dalam dugaan tersebut sebagai rangkaian sempurna riswah, DP pertama, DP kedua, dan pelunasan," tutur Gus Lilur.

Ia menyatakan akan kembali mendatangi KPK untuk melaporkan sejumlah pihak yang menurutnya diduga terlibat dalam rangkaian jual beli suara dan suap pada Mukhtar NU ke-35.

"Ibarat pertunjukan film, LP Tipikor ini baru tayangan pembuka. Belum isi filmnya. Apalagi aksi paling serunya," jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, setiap informasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan masyarakat.

Namun, KPK tidak dapat mengonfirmasi secara terbuka apakah suatu laporan telah diterima, termasuk identitas pelapor maupun materi yang dilaporkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

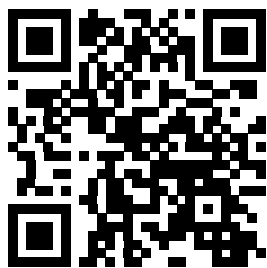
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Mendagri Pecat Husniah Talenrang Secara Tidak Hormat, Darmawangsyah Muin Ambil Alih Bupati Gowa

Oleh Redaksi · 15 Okt, 10.07 WIB



BANDA ACEH — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi memberhentikan Sitti Husniah Talenrang secara tidak hormat dari jabatan Bupati Gowa, Sulawesi Selatan. Keputusan tertanggal 14 Oktober 2026 itu sekaligus menunjuk Wakil Bupati Darmawangsyah Muin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa untuk melanjutkan roda pemerintahan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, membenarkan terbitnya surat keputusan (SK) pemberhentian tersebut. Ia menyatakan Kemendagri juga telah menerbitkan SK penunjukan Darmawangsyah sebagai Plt Bupati.

"Iya betul, SK Mendagri tertanggal 14 Oktober memutuskan memberhentikan saudara HT sebagai Bupati Gowa secara tidak hormat," kata Hasrul, Kamis (15/10/2026).

Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah media, SK pemberhentian Husniah bernomor 100.2.1.3-3256 Tahun 2026. Sementara itu, dokumen fisik keputusan tersebut dijadwalkan

diambil melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (15/10).

Darmawangsyah Muin Disiapkan Pimpin Pemerintahan Gowa

Penunjukan Darmawangsyah sebagai Plt Bupati menandai peralihan kepemimpinan di Kabupaten Gowa setelah proses pemberhentian Husniah melalui mekanisme kelembagaan dan hukum.

Hasrul mengatakan, keputusan Mendagri menjadi dasar bagi DPRD Gowa untuk melanjutkan tugas dan fungsi kelembagaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

DPRD juga menempatkan kelancaran transisi pemerintahan sebagai prioritas. Pergantian pimpinan daerah diharapkan tidak menghambat pelayanan publik, pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN), maupun pelaksanaan program pembangunan.

"Prioritas kami adalah memastikan proses transisi pemerintahan berjalan tertib, pelayanan publik tidak terganggu, hak-hak ASN tetap terpenuhi, dan seluruh program pembangunan daerah berja-

lan sebagaimana mestinya," ujar Hasrul.

Dengan penunjukan tersebut, perhatian kini tertuju pada pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Darmawangsyah serta proses administrasi penyerahan keputusan dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi kepada DPRD Gowa.

Pemberhentian Husniah merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa terkait usulan pemberhentiannya.

Putusan dalam perkara Nomor 1 P/UP/2026 itu dibacakan pada Kamis (1/10/2026). Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan dan menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum.

Sebelum keputusan Mendagri terbit, DPRD Gowa telah menjalankan rangkaian proses Politik dan hukum, termasuk Hak Angket serta pengajuan usulan pemberhentian kepada pemerintah pusat. Dokumen usulan tersebut diserahkan kepada Kemendagri pada 8

Oktober 2026 setelah tahapan administrasi diproses.

Di luar proses pemberhentian dari jabatan bupati, Husniah juga menghadapi perkara hukum lain. Sejumlah laporan media menyebut ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kortastipidkor Bareskrim Polri pada 25 September 2026 dalam perkara dugaan korupsi terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya di Kabupaten Gowa.

Perkara tersebut merupakan proses hukum terpisah dari mekanisme pemberhentian yang ditindaklanjuti melalui putusan MA dan keputusan Mendagri. Status tersangka tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah; pembuktian tetap menjadi kewenangan proses peradilan.

Hingga Kamis (15/10/2026), Hasrul menyatakan DPRD Gowa belum menerima dokumen fisik SK pemberhentian dan penunjukan Plt Bupati. Ia menyebut dokumen tersebut akan diambil melalui Pemprov Sulawesi Selatan

NASIONAL

Kata Jenderal Tandyo soal Kans Jabat Panglima TNI Usai Dilantik Jadi KSAD

Oleh Redaksi · 15 Okt, 21.08 WIB



Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Jenderal TNI Tandyo Budi Revita enggan menanggapi soal kans dirinya menjadi Panglima TNI, seiring pelantikan dirinya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Tandyo hanya menegaskan bahwa pemilihan Panglima TNI bukan merupakan kewenangannya. Ia menyebut hal itu di luar kemampuannya.

"Di luar kemampuan saya," kata Tandyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10).

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memberikan tanggapan terkait langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang melantik Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI serta Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Saat ditanya mengenai perubahan strategi pertahanan maupun motif Politik di balik rotasi jabatan tersebut, TB Hasanuddin enggan berspekulasi lebih jauh.

"Ya, kita tunggu kelanjutannya nanti," kata TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

Menjawab pertanyaan apakah posisi baru ini menjadi sinyal kuat untuk pergantian Panglima TNI kelak, TB Hasanuddin meminta publik untuk bersabar.

"Bisa, sinyal bisa tidak. Ya, nanti kita tunggu lah 2 bulan ke depan," ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa dengan konfigurasi kekinian, kriteria persyaratan untuk bursa kepemimpinan TNI telah terpenuhi.

"Jadi, ya, yang wakil panglima tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang jadi, ada dari Angkatan Darat dua dong. Satu wakil panglima yang baru, kedua KSAD yang baru, nah, begitu," jelasnya.

Mengenai aturan berapa lama seseorang harus menjabat sebagai kepala staf agar memenuhi syarat menjadi Panglima TNI, TB Hasanuddin menegaskan, tidak ada batasan minimal durasi waktu dalam aturan yang berlaku.

"Berapa lama? Satu jam juga boleh. Yang penting, yang penting pernah dapat SK," tegasnya.

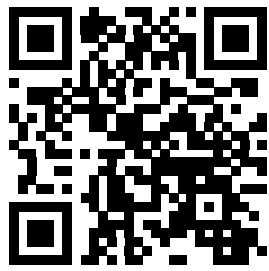
Terkait anggapan bahwa KSAD yang baru kini tinggal satu langkah lagi menuju kursi Panglima TNI, TB Hasanuddin kembali menegaskan agar publik menunggu perkembangan dalam beberapa bulan mendatang.

"Ya, soal satu langkah atau dua langkah, saya enggak tahu, nanti tunggu, tunggu 2 bulan ke depan lah ya," ujar dia.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jadi Menteri Terburuk, Ada Isu Bahlil Lahadalia Akan Segera Dicopot, Ini Katanya Usai Temui Prabowo

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.16 WIB



BANDA ACEH - Nama Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan setelah survei terbaru menempatkannya sebagai menteri dengan penilaian kinerja terburuk.

Di tengah hasil tersebut, muncul kabar mengenai kemungkinan adanya pengganti Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jabatan yang hingga kini masih dirangkapnya.

Menanggapi kabar tersebut, Bahlil menegaskan dirinya masih menjalankan dua jabatan sekaligus sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyatakan tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.

"Sampai dengan hari ini, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebaik sebagai Menteri ESDM maupun

sebagai Menko Hilirisasi," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Bahlil sendiri baru dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026.

Sejak pelantikan tersebut, ia telah menegaskan bahwa dirinya akan tetap merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.

Pada Rabu (14/10/2026), Presiden Prabowo Subianto juga sempat memanggil Bahlil ke Istana Merdeka, Jakarta. Namun, pertemuan tersebut membahas perkembangan sejumlah isu strategis di sektor energi, bukan semata-mata soal posisi Bahlil di kabinet.

Pembahasan mencakup Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), evaluasi gangguan kelistrikan di sejumlah daerah, serta kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Sebelumnya, sorotan terhadap Bahlil tidak lepas dari hasil survei terbaru Arawicaksa Institute.

Dalam survei tersebut, ia menempati posisi terbawah dalam daftar penilaian kinerja menteri dengan skor rata-rata hanya 1,2.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dinilai turut memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja Kementerian ESDM.

"Naiknya harga BBM nonsubsidi seperti Pertamina mendorong terjadi migrasi konsumen ke Pertalite dan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU," kata Rudi Hartono.

Selain Bahlil, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berada di urutan berikutnya dengan skor 1,3. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh nilai 1,5, disusul Menteri Perumahan dan Kawa-

san Permukiman Maruarar Sirait dengan skor 1,6.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mendapat skor 1,8. Lima nama tersebut masuk dalam kelompok 10 menteri dengan penilaian terburuk berdasarkan survei tersebut.

Lima menteri lainnya adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan skor 2,0, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan nilai 2,1, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini yang memperoleh skor 2,2.

Menteri Ketenagakerjaan Yasserli juga mendapat skor 2,2, sedangkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperoleh nilai 2,3.

NASIONAL

Nusron Wahid Belum Penuhi Panggilan KPK

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.14 WIB



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid belum memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hingga Kamis siang, 15 Oktober 2026.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik masih menunggu kehadiran Nusron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Sampai dengan siang ini, yang bersangkutan belum hadir. Penyidik masih tunggu di Gedung Merah Putih KPK, pemenuhan pemeriksaan oleh yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi," kata Budi kepada wartawan.

Selain itu, kata Budi, hingga siang ini juga, tim penyidik belum menerima konfirmasi apapun, baik kehadiran ataupun ketidakhadiran Nusron.

"Oleh karena itu, kami meyakini saksi akan hadir dalam penjadwalan ulang pemeriksaan hari ini," pungkas Budi.

Pemeriksaan kali ini merupakan penjadwalan ulang setelah Nusron sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu, 7 Oktober 2026. Saat itu, Nusron menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengingatkan komitmen Nusron yang pernah menyatakan akan mendukung dan membantu proses penegakan hukum.

Setyo juga berharap Nusron memenuhi panggilan penyidik

untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Perkara ini diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti elektronik hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif Sugiyanto dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara ini, yakni Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, serta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

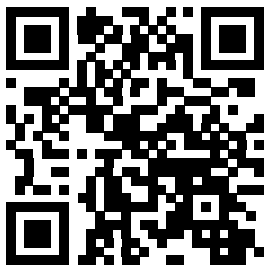
Penyidikan perkara ini berawal dari dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Selain itu, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lainnya terkait pelayanan pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

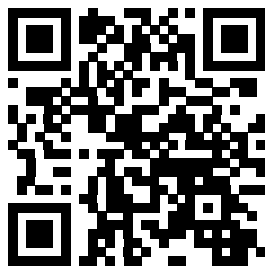
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Profil Suroso Isnandar, Dirut Baru PLN Pengganti Darmawan Prasodjo

Oleh Redaksi · 15 Okt, 08.22 WIB



BANDA ACEH - Suroso Isnandar resmi menduduki kursi Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Rabu (14/10/2026) malam. Berkariernya dari dalam perusahaan, Suroso membawa pengalaman di bidang pembangkitan, penyaluran listrik, teknologi informasi, hingga energi baru terbarukan (EBT).

Sebelum dipercaya memimpin PLN, Suroso menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan. Pengangkatannya ke posisi tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-159/MBU/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025.

Pergantian pucuk pimpinan ini menempatkan Suroso di tengah tantangan besar, mulai dari menjaga keandalan pasokan listrik hingga mempercepat pengembangan energi bersih dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Pengalaman Suroso di PLN terbilang panjang. Pada 2019–2021, ia menjabat General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi. Ia kemudian memimpin PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali pada 2021–2022.

Jabatan berikutnya adalah Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi di Direktorat Utama PLN Kantor Pusat pada 2022–2023. Ia juga mengantongi sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) di bidang tata kelola dan manajemen risiko.

Suroso lahir di Klaten pada 12 Agustus 1971. Ia meraih gelar sarjana bidang Power System Engineering dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1994, kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang Power System Engineering and Management di University of Abertay pada 1999.

Pada 2025, ia menyelesaikan pendidikan doktor Teknik Elektro di ITB.

Latar belakang teknis dan pengalamannya di sejumlah posisi strategis menjadi bekal untuk memimpin PLN. Namun, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan pengalaman tersebut menjadi kinerja perusahaan yang lebih baik, layanan listrik yang andal, serta pengembangan infrastruktur dan energi terbarukan.

Harta Kekayaan Suroso Isnandar Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2025, Suroso Isnandar tercatat memiliki kekayaan bersih Rp18,64 miliar. Laporan tersebut disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Maret 2026, saat ia masih menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.

Aset terbesar Suroso berupa tanah dan bangunan senilai

Rp11,87 miliar, terdiri atas enam bidang properti yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Depok, Klaten, dan Banyumas. Properti termahalnya berupa tanah seluas 265 meter persegi dengan bangunan 180 meter persegi di Jakarta Selatan, senilai Rp7,2 miliar.

Selain properti, Suroso melaporkan kas dan setara kas Rp5,97 miliar, harta lainnya Rp1,6 miliar, kendaraan Rp685 juta, serta surat berharga Rp155,1 juta.

Koleksi kendaraannya terdiri atas Toyota Avanza Veloz tahun 2014 senilai Rp75 juta, Nissan Serena tahun 2017 Rp210 juta, dan Subaru Forester tahun 2023 Rp400 juta.

Secara keseluruhan, total aset yang dilaporkan mencapai Rp20,28 miliar. Setelah dikurangi utang Rp1,63 miliar, kekayaan bersih Suroso tercatat Rp18,64 miliar

NASIONAL

Desak Pemakzulan Gibran, Tim Advokasi Sambangi Gerindra dan Minta Prabowo Turun Tangan

Oleh Redaksi · 15 Okt, 12.08 WIB



BANDA ACEH - Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa bersama Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mendesak Partai Gerindra menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Desakan itu disampaikan saat mendatangi Kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026), untuk menyerahkan surat tuntutan.

Perwakilan tim advokasi, Ahmad Khozinudin, menilai partai Politik memiliki peran penting dalam mendorong tindak lanjut putusan MK melalui fraksi mereka di DPR RI. Dia menyinggung putusan MK yang menurutnya tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen pendidikan tingkat SMA atau sederajat milik Gibran, serta ruang bagi lembaga lain untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan calon peserta Pilpres 2024.

“Hari ini kami datang ke partai politik, karena meskipun secara formal kedaulatan rakyat yang ada di DPR itu milik rakyat, tapi anggota DPR itu secara materiil justru milik partai politik. Kami yakin kalau pimpinan partai politik memberikan perintah ke fraksinya yang ada di DPR RI, maka proses pemakzulan Gibran ini bisa bergulir,” tutur Khozinudin.

Khozinudin mengatakan, pihaknya tidak ingin perjuangan terkait persoalan etika, moral, dan integritas dalam berbangsa, khususnya menyangkut wakil presiden, dimanfaatkan sebagai komoditas politik. Karena itu, dia meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengarahkan Fraksi Gerindra di DPR RI untuk

menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Dan kami tegaskan melalui surat kami, kami sudah minta juga ke pimpinan Partai Gerindra, Ketua Umumnya Bapak Prabowo Subianto, agar apa? Agar memerintahkan fraksi di DPR RI, Fraksi Gerindra tentunya, untuk mengaktifasi HMP (hak menyatakan pendapat),” ungkapnya.

Dia menilai persyaratan Gibran saat mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 bermasalah dari sisi moral, etika, dan integritas. Khozinudin bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai cacat konstitusional. Atas dasar penilaian itu, dia mendesak partai politik menindaklanjuti putusan MK dan mendorong proses pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.

“Dan kami akan sampaikan kepada rakyat, ‘Wahai rakyat, lihatlah dalam kasus ini, mana saja pimpinan partai politik yang pro terhadap rakyat, yang tidak suka, tidak ridho negeri ini integritasnya dirusak, negeri ini moralnya dirusak, bahkan tak lagi memiliki integritas untuk ditaati sebagai pemimpin manakala sudah cacat, cacat syarat, cacat konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat’ ucap Khozinudin.

Khozinudin juga menyatakan partai politik yang menindaklanjuti aspirasi tersebut dapat dinilai memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Namun bagi partai-partai yang mengakomodir, menindaklanjuti, tentu saja ini bisa dipertimbangkan sebagai partai yang memang pro terhadap rakyat, yang memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat,” pungkasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

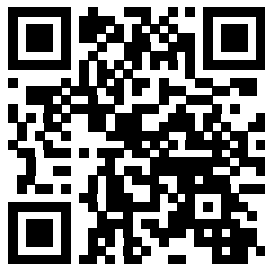
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Dedi Mulyadi Ingatkan Para Elite agar Tidak Meremehkan Gibran: Dia Kuat dalam Etika dan Budi Pekerti

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.24 WIB



BANDA ACEH - Video lawas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membahas kapasitas Politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali beredar dan menyita perhatian publik.

Video tersebut diunggah ulang oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, di tengah polemik ijazah Gibran.

Dalam video itu, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengingatkan para elite politik agar tidak meremehkan Gibran.

Menurutnya, kemampuan politik putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut tidak bisa dinilai hanya dari penampilan, gaya bicara, maupun sikap yang terlihat di hadapan publik.

"Hati-hati terhadap Mas Gibran. Yang lain politisinya polos-polos, bersikap hanya dengan kata-katanya, tapi tidak dengan rasa-

nya, yang ini hati-hati," kata Dedi, dikutip Kamis (15/10/2026).

Dedi pun mengajak publik memperhitungkan latar belakang keluarga Gibran, termasuk pendidikan mengenai budaya Jawa dan tradisi Solo.

Ia menilai lingkungan keluarga turut membentuk karakter serta cara Gibran berinteraksi dengan orang lain.

"Dia itu adalah anak Pak Jokowi. Karena anaknya Pak Jokowi, dia ngerti betul kebudayaan Jawa. Dia ngerti betul bagaimana tradisi Solo. Mas Gibran pasti mendapat pendidikan sangat kuat tentang etika, tentang budi pekerti dalam keluarga, dalam bahasa kesehariannya tentang adab," ujarnya.

Selain latar belakang keluarga, Dedi menyoroti sikap Gibran

ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua.

Ia menilai Gibran mampu menunjukkan ketenangan dan rasa hormat, tanpa mudah memperlihatkan emosi di hadapan publik.

"Yang kedua yang diberikan oleh Mas Gibran tentang sikap, adab, tenang, hormat kepada semua. Selalu membungkukkan badan ketika bertemu dengan yang lebih tua, tidak kelihatan emosional," ungkapnya.

Dedi juga mengaitkan kapasitas Gibran dengan perjalanan politik Jokowi. Ia mengingatkan bahwa Jokowi pernah dipandang sebelah mata pada awal karier politiknya, tetapi kemudian berhasil meniti perjalanan dari kepala daerah hingga menjadi presiden selama dua periode.

Bagi Dedi, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa peni-

laian awal terhadap seorang tokoh politik belum tentu menggambarkan seluruh kapasitasnya.

Kemampuan membangun dukungan, membaca situasi, dan menjalin hubungan dengan berbagai kelompok juga perlu diperhitungkan.

Dedi pun menyoroti kemampuan Gibran dalam memanfaatkan ruang digital. Menurutnya, pemahaman terhadap tren media sosial dan kemampuan membangun narasi menjadi modal penting bagi politisi di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat.

"Gibran memiliki literasi digital yang jauh melampaui para politisi senior. Ia piawai membaca tren media sosial, mendesain narasi, dan melahirkan celetukan unik yang secara cepat mampu menguasai perbincangan publik dan menjadi viral," sebut Dedi.

NASIONAL

Siapa yang Disindir SBY? Politisi PSI Beri Respons Menohok

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.18 WIB



BANDA ACEH - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, menyoroti pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyindir sosok mantan presiden yang dinilai tidak mampu menjadi negarawan sejati karena pikirannya hanya berputar pada pemilu dan kekuasaan.

Sejumlah pihak menduga sindiran tersebut ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang hingga kini masih dianggap aktif dalam dinamika Politik nasional.

Salah satu yang disorot adalah safari politiknya ke berbagai daerah yang dinilai bertujuan membesarkan PSI.

Menanggapi hal itu, Dedy menilai SBY juga masih terlibat dalam politik meski tidak menunjukkannya secara terang-terangan.

"Saling sindir itu artinya SBY juga masih berpolitik, cuman agak malu-malu saja. Orang politik kalau masih senang intip dapur tokoh lain artinya dia juga belum selesai dalam politik," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (15/10).

Menurut Dedy, Jokowi justru secara terbuka menunjukkan kedekatannya dengan PSI.

"Jokowi jelas terbuka bersama PSI dan itu sangat baik, ngapain

main belakang layar lagi. Dunia sudah ngga sama lagi," tegasnya.

Sebelumnya, dalam perayaan Dies Natalis ke-68 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Rabu (14/10/2026), SBY menjelaskan bahwa para politisi umumnya dihadapkan pada kepentingan jangka pendek, termasuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan.

"Kalau presiden, gubernur, wali kota, bupati, berpikir semoga terpilih kembali. Anggota DPR, DPRD, DPD pasti berpikir terpilih kembali. Itu tidak salah, itulah politisi," kata SBY.

SBY menuturkan bahwa para pejabat dan politisi wajar memikirkan bagaimana mempertahankan dukungan publik agar kembali terpilih.

Namun, menurutnya, pola pikir tersebut berbeda dengan seorang negarawan yang harus memikirkan masa depan bangsa dalam jangka panjang.

"Negarawan harus memikirkan hal-hal jauh di masa depan. State-man itu tak harus mantan presiden. Bukan semua bisa jadi negarawan. Country over party. Country first. Jangan pula dibalik, jangan partai politik diutamakan sementara negara belakangan, wrong," tegasnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

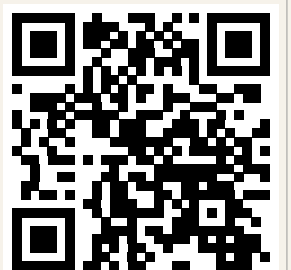
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KPK Buka Peluang Periksa Kepala BNPB Suharyanto dalam Kasus Korupsi Dana Bencana

Oleh Redaksi · 15 Okt, 08.31 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memanggil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto untuk diperiksa dalam penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan periode 2022-2026.

Ketua KPK Setyo Budiyo menyatakan, pemanggilan seseorang sebagai saksi harus didasarkan pada kebutuhan penyidikan. Penyidik juga akan menilai relevansi keterangan calon saksi dengan perkara yang tengah diurus.

"Ya, kalau soal itu, kebutuhan, ya, ya, tentu kebutuhan, gitu, kebutuhan dan kesesuaian, ya," kata Setyo di sela-sela acara 'Jelajah Media 2026' di Jogjakarta, Rabu (14/10).

Menurut Setyo, penyidik akan menganalisis setiap informasi yang muncul selama proses pemeriksaan, termasuk apabila terdapat pihak yang menyebut nama Suharyanto. Keterangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan perlu atau tidaknya pemanggilan.

"Kesesuaian itu misalkan begini, kalau misalkan ada pihak yang menyebutkan dan itu kemudian dianalisis oleh penyidik dianggap memang relevan, ya, antara kesesuaian dengan kebutuhan, tentu akan dilakukan. Namun, kalau memang tidak, tentu juga penyidik tidak akan memaksakan," tegas Setyo.

Setyo juga memastikan, sampai saat ini pihaknya belum menentukan perkara tersebut menggunakan sistem koneksitas, meski adik dari Kepala BNPB, Bima Setiawan

ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai kebencanaan.

"Belum, kan ini baru lima orang ini saja," jelasnya.

Adapun, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana di lingkungan BNPB. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT), pada Selasa (13/10).

Salah satu tersangka adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit (GPS). Selain itu, KPK menetapkan Bima Setiawan, yang disebut sebagai adik Letjen TNI

Suharyanto, serta Richard Erlangga, yang disebut sebagai tenaga ahli Suharyanto.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery Prasetyawan dan Syifa Nrika Ghifarian. Kelimanya kini menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, untuk masa penahanan awal selama 20 hari.

Penyidikan ini berfokus pada dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana dalam rentang 2022-2026. KPK menduga anggaran yang semestinya digunakan untuk mendukung penanganan kebencanaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai peruntukannya dan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi

NASIONAL

Maruli Simanjuntak Rangkap Jabatan, Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan

Oleh Redaksi · 15 Okt, 20.17 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Maruli Simanjuntak untuk dua jabatan, yakni Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. "Mengangkat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil," ujar Sekretaris Militer Presiden Jenderal TNI Wahyu Yudhayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Usai penjelasan Wahyu, Prabowo mendikte sumpah jabatan dan diikuti oleh Maruli yang menggantikan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di posisi Wakil Panglima TNI.

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo mendikte penggalan

sumpah jabatan yang diikuti Maruli.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil

Adapun Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil adalah lembaga yang menetapkan kebijakan program, perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil memiliki sejumlah fungsi, yakni penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

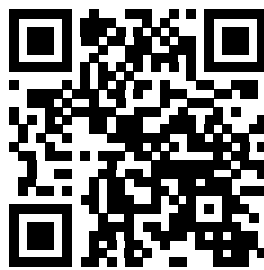
Selain itu, badan ini memiliki fungsi pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Fungsi lainnya adalah penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

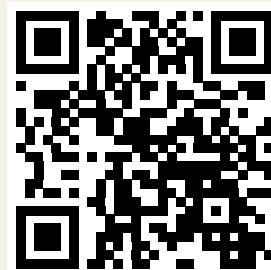
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Jika Ijazah SMA Gibran Tak Dapat Ditunjukkan, Politik Jokowi Sudah Tamat

Oleh Redaksi · 15 Okt, 08.26 WIB



BANDA ACEH — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan ijazah SMA Gibran tidak dapat ditunjukkan secara nyata berarti Gibran tidak memiliki ijazah tersebut, sehingga pencalonannya dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Ia pun menegaskan tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Gibran di jabatannya.

Anthony menyebut pihak lain telah menuduh KPU dan Gibran melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk dugaan pemalsuan dokumen. Menurutnya, semakin lama hal ini dibiarkan, semakin jelas terlihat Gibran tidak memenuhi syarat sekaligus semakin terlihat adanya unsur pidana.

“Pemberhentian ini hampir pasti terjadi, dan ketika terjadi, manuver Politik Jokowi berakhir,” kata Anthony, Selasa (14/10/2026).

Ia menjelaskan dampak pertama dari berakhirnya kekuasaan Gibran adalah tertutupnya pintu politik bagi keluarga Jokowi. Sidang di Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai skakmat bagi Jokowi beserta keluarganya.

Selanjutnya, Anthony juga menyebut jika Kaesang Pangarep yang selama ini menjadi tumpuan Jokowi berikutnya pun dinilai tidak memiliki jalan menuju pencalonan presiden dalam dua periode ke depan.

Kaesang lahir pada 25 Desember 1994, sehingga baru berusia 40 tahun pada 25 Desember 2034 dan belum memenuhi syarat usia untuk Pilpres 2029 maupun 2034.

Kesempatan pertamanya baru akan datang pada 2039, yaitu 13 tahun dari sekarang. Pada tahun itu, Jokowi diperkirakan berusia 78 tahun.

Menurut Anthony, asumsi bahwa keluarga Jokowi akan terus mengajukan keturunannya bukan karena Gibran atau Kaesang dinilai hebat dan layak, melainkan bertumpu pada rekam jejak yang dianggap haus kekuasaan dengan memanfaatkan aturan main dan konstitusi.

“Jokowi dan anak-anaknya mempermainkan konstitusi dan proses pencalonan, serta manipulasi dokumen untuk meraih kekuasaan, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di KPU, bahkan dengan melibatkan lembaga dan kementerian pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anthony menyampaikan seluruh bangunan politik Jokowi dinilai rapuh, semu, manipulatif, dan penuh kebohongan. Politik Jokowi saat ini hanya bertumpu pada satu anak tangga, yaitu Gibran, yang dibangun di atas proses yang cacat dan kini terbuka.

“Sepandai-pandainya bajing melompat, akhirnya jatuh juga,” tegasnya.

Begitu Gibran jatuh, lanjut Anthony, semuanya akan runtuh. Tidak ada penerus yang siap, tidak ada jalur konstitusional yang tersisa, dan tidak ada waktu yang memadai. Dalam dua periode pilpres ke depan, keluarga Jokowi dinilai tidak memiliki kandidat yang memenuhi syarat.

“Politik Jokowi sudah tamat,” pungkasnya

NASIONAL

Kristomei Sianturi Resmi Jadi Kepala BNPB Gantikan Suharyanto

Oleh Redaksi · 15 Okt, 16.26 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto melantik Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letjen TNI Suharyanto.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis sore, 15 Oktober 2026, bersamaan dengan pengangkatan sejumlah wakil menteri dan pimpinan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Dalam prosesi tersebut, dibacakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 113 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB.

Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Kristomei.

“Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” kata Presiden.

Sebelum dipercaya memimpin BNPB, Kristomei menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten yang membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu. Lahir di Kotabumi, Lampung Utara, pada 6 Mei 1976,

Kristomei merupakan lulusan Akademi Militer (Akmi) 1997 dari kecabangan infanteri.

Karier militernya antara lain mencakup penugasan di lingkungan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak pada 2013-2014, serta Komandan Kodim 0424/Tanggamus pada 2014-2016.

Dia juga pernah menjabat Kepala Penerangan Kodam Jaya, sebelum dipercaya menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat pada 2023 dan Wakil Gubernur Akademi Militer pada 2024.

Pada Maret 2025, Kristomei ditunjuk sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI.

Beberapa bulan kemudian, pada Agustus 2025, ia dilantik menjadi Pangdam XXI/Radin Inten.

Penunjukan sebagai Kepala BNPB kini menandai penugasan baru bagi Kristomei untuk memimpin lembaga yang mengoordinasikan penanggulangan bencana di tingkat nasional.

Pergantian pimpinan BNPB berlangsung di tengah tantangan penanganan bencana di berbagai daerah, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Danantara Beberkan Alasan Pencopotan Darmawan Prasodjo dari Dirut PLN

Oleh Redaksi · 15 Okt, 08.09 WIB



BANDA ACEH - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatan Direktur Utama PT PLN (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada, Rabu (14/10/2026). Danantara turut menyoroti peningkatan layanan kelistrikan menyusul gangguan pasokan listrik di Batam.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menuturkan, penguatan PLN Group merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong transformasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas kami dalam penguatan PLN Group. Melalui penyegaran manajemen ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas layanan, mulai dari keandalan

pasokan hingga respons terhadap kebutuhan pelanggan," kata Dony dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Dony menambahkan, peningkatan layanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung aktivitas dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

Danantara menilai, penguatan kinerja PLN Group diperlukan agar perusahaan semakin mampu menyediakan pasokan listrik yang andal serta memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan.

Komitmen tersebut juga mencakup peningkatan layanan PT PLN Batam setelah terjadi gangguan pasokan listrik pada 12 Oktober 2026. Dony menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan PLN Batam atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Dia mengatakan, Danantara memahami kesulitan yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha akibat gangguan tersebut. Danantara pun berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pelayanan PLN Batam.

"Kebutuhan pelanggan menjadi perhatian utama kami, dan kami berkomitmen untuk mendukung PLN Batam dalam memberikan pelayanan yang semakin baik," ucapnya.

Selain mendorong peningkatan layanan, Danantara menyiapkan penguatan pengelolaan PLN Batam. Dalam arah transformasi perusahaan, PLN Batam selanjutnya akan berada langsung di bawah Danantara Indonesia.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengembangkan potensi perusahaan, meningkatkan layanan kelistrikan, serta memperkuat daya tarik investasi di Batam. Kawasan tersebut dinilai memiliki

peluang pertumbuhan seiring perannya sebagai salah satu penggerak perekonomian dan tujuan investasi di Indonesia.

Danantara menyebut PLN Batam menjalankan model bisnis mandiri tanpa menerima subsidi maupun kompensasi dari pemerintah.

Dengan penguatan perusahaan dan peningkatan kualitas layanan, PLN Batam diharapkan semakin optimal memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha.

Ke depan, penyegaran manajemen dan penguatan pengelolaan perusahaan diharapkan dapat memperkuat kinerja PLN Group sekaligus meningkatkan keandalan pasokan serta kualitas pelayanan kepada pelanggan di seluruh Indonesia

NASIONAL

Dokter Tifa Protes Andi Azwan Bersaksi di Sidang Kasus Ijazah Jokowi: Buang-Buang Uang Saja

Oleh Redaksi · 15 Okt, 19.04 WIB



BANDA ACEH - Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak relevan menghadirkan Andi Azwan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dia menilai kesaksian Andi tidak berkaitan dengan perkara yang menjeratnya sehingga pemeriksaan saksi berlangsung singkat.

Menurut Dokter Tifa, keterangan Andi tidak memiliki relevansi dengan perkara yang dihadapinya. Dia bahkan menilai kehadiran Andi dalam persidangan hanya membuang-buang uang.

"Nah, mengapa Azwan tadi itu cepat sekali? Karena memang dia bersaksi, dia bersaksi ya BAP-nya dia itu tidak ada hubungannya dengan dokter Tifa sama sekali. Ya, jadi memang tidak ada relevansinya sebetulnya JPU mengundang Azwan ini ke persidangan ini, hanya buang-buang uang saja,"

kata Dokter Tifa usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026).

Dokter Tifa juga menyoroti pengakuan Andi Azwan yang menyebut kehadirannya di ruang sidang untuk memberikan keterangan terkait terdakwa lain, bukan dirinya.

"Karena memang dia sendiri juga tadi mengatakan bahwa dia tidak datang untuk bersaksi untuk Dokter Tifa, dia datang untuk bersaksi untuk tersangka yang lain ya, dan terdakwa yang lain dan bukan saya," jelasnya.

Atas dasar itu, Dokter Tifa mengatakan pihaknya tidak mengajukan pertanyaan substantif kepada Andi Azwan ketika mendapat kesempatan bertanya kepada saksi.

"Karena itu, maka tadi kami bertanya juga tidak substantif ya, karena memang tidak ada bahannya juga dan dia juga punya BAP itu sangat tipis ya," jelasnya.

NASIONAL

Prabowo Lantik Empat Wamen Baru Sore Ini

Oleh Redaksi · 15 Okt, 16.23 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik empat wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis sore, 15 Oktober 2026.

Berdasarkan pantauan RMOL yang dikutip HARIANACEH.co.id, prosesi pelantikan berlangsung di ruang tengah Istana Negara. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki ruangan untuk mengikuti rangkaian acara pelantikan.

Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 N Tahun 2026 tentang pengangkatan wakil menteri.

Empat pejabat yang dilantik yakni Yusuf Djauhari dan Richard

Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Alim Setiawan sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan yang diikuti keempat wakil menteri.

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya," kata Presiden.

Setelah pengucapan sumpah, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KPK Kembali Panggil Nusron Wahid terkait Kasus Korupsi ATR/BPN Hari Ini

Oleh Redaksi · 15 Okt, 08.17 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada hari ini, Kamis (15/10/2026). Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap Nusron memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Kalau masalah substansi, kemudian materi hasil apa pemeriksaannya, keterangan yang dibutuhkan apa semuanya, itu nanti prosesnya berjalan kalau yang bersangkutan sudah hadir," ucap Setyo saat ditemui di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo menambahkan, hingga Rabu, KPK belum menerima surat pemberitahuan bahwa Nusron tidak dapat memenuhi panggilan

pemeriksaan yang dijadwalkan pada Kamis.

"Harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan," kata dia.

Setyo juga mengingatkan pernyataan Nusron sebelumnya yang menyatakan komitmen mendukung proses penegakan hukum oleh KPK. Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi kesempatan bagi Nusron untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

"Saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang ber-

sangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik," tuturnya.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Nusron pada Rabu (7/10/2026). Namun, dia tidak dapat hadir dan menyampaikan konfirmasi melalui surat kepada KPK.

"Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Budi menjelaskan, Nusron tidak hadir karena memiliki agenda lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai ter-

sangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

Mereka adalah mantan Bupati Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz (FEZ) alias Fahd A Rafiq, Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).

Empat tersangka lainnya yakni Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Son-tang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Sum-marecon; serta Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta

NASIONAL

Tak Hanya Soal Gibran, Ray Rangkuti Ungkap Alasan Minta Seluruh Komisioner KPU Diganti

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.26 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkaran Madani, Ray Rangkuti, menilai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2026 sebaiknya tidak kembali menjabat pada periode berikutnya.

Menurutnya, rekam jejak lembaga tersebut selama masa tugasnya diwarnai berbagai polemik yang memengaruhi kepercayaan publik.

Ray menyebut salah satu isu yang mencuat adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PPHU.PRES-XXIV/2026 terkait tidak ditemukannya dokumen penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kontroversi yang melibatkan penyelenggara pemilu.

Dalam sebuah diskusi yang digelar di Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jakarta Timur, Rabu (14/10/2026), Ray menyampaikan harapannya agar proses seleksi anggota KPU mendatang menghadirkan figur-figur baru.

"Pertanyaannya apakah mereka masih layak untuk dicalonkan sebagai anggota penyelenggaraan pemilu atau tidak? Kalau saya sih

berharap sudah selesai. Kita harus cari anggota KPU baru," kata Ray, dikutip Kamis (15/10).

"Ya, enggak mungkin lagi kita berharap dengan penyelenggara Pemilu yang penuh dengan kontroversi," lanjut dia.

Menurutnya, polemik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pencalonan Gibran, tetapi juga menyangkut sejumlah aturan pemilu dan minimnya keterwakilan perempuan di tubuh KPU.

Ia turut menyinggung persoalan penyesuaian regulasi setelah adanya perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan MK.

Atas dasar berbagai persoalan tersebut, Ray berpandangan bahwa anggota KPU saat ini sebaiknya memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk memimpin lembaga penyelenggara pemilu.

Ia berharap pergantian komisioner dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di masa mendatang.

Ray menegaskan bahwa meskipun para anggota KPU periode 2022-2026 masih memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri, dirinya menilai sudah saatnya dilakukan pembaruan di tubuh lembaga tersebut agar tidak terus dibayangi kontroversi yang sama.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Golkar Serba Salah Hadapi Polemik Pendidikan Gibran

Oleh Redaksi · 15 Okt, 09.54 WIB



BANDA ACEH -Sikap Partai Golkar dalam polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih setengah hati. Golkar terlihat berhati-hati dalam menentukan sikap di tengah tarik-menarik kepentingan Politik Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

Pengamat Politik Nurul Fatta menilai, perbedaan pernyataan sejumlah kader Golkar menunjukkan belum solidnya sikap partai berlambang pohon beringin itu dalam menyikapi polemik pendidikan Gibran.

Misalnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadi-kin yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dijadikan dasar pemakzulan karena amar putusannya berbunyi permohonan tidak diterima.

Namun, pernyataan tersebut disebut sebagai pandangan pribadi.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR dari Golkar, Doli Kurnia, justru menyoroti Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang disebutnya sebagai pasal selundupan.

Menurut Fatta, pasal tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi pasangan calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah di luar negeri.

"Artinya ini kan pasal yang dibuat seolah-olah untuk meloloskan Gibran," kata Nurul Fatta kepada RMOL, Kamis, 15 Oktober 2026.

Ia menilai, kondisi tersebut memperlihatkan Golkar masih gamang dalam menentukan keberpihakan. Di satu sisi, Golkar merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo. Namun, di sisi lain, partai itu dinilai masih

memiliki kedekatan politik dengan Jokowi.

"Mau membela Mas Gibran tidak enak sama Pak Prabowo karena bagian dari partai koalisi. Mau terang-terangan membiarkan Mas Gibran, sepertinya gak enak sama Pak Jokowi," ujarnya.

Fatta menambahkan, Golkar juga memiliki pertimbangan historis terkait perolehan suara pada Pemilu 2024. Menurutnya, capaian elektoral Golkar saat itu tidak terlepas dari sosok Jokowi.

Karena itu, ia menilai Golkar masih memiliki beban politik untuk menjaga hubungan dengan Jokowi, yang dianggap turut memberikan keuntungan elektoral bagi partai tersebut.

"Tentu utang budi atas keuntungan elektoral yang mereka dapatkan pada Pemilu 2024 membuat mereka segan sama Pak Jokowi," pungkasnya.

NASIONAL

Belum Ada Info soal Pergantian Kepala BNPB usai Diguncang OTT KPK

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.30 WIB



BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton Panjaitan menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai adanya pergantian pimpinan lembaga itu di tengah dinamika hukum yang tengah berjalan.

"Kami belum mendapatkan informasi ini," ucapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Namun dia menegaskan bahwa institusinya menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden RI.

"Pada prinsipnya, kami menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden dalam menentukan dan menetapkan pimpinan BNPB," ujarnya.

Penentuan pimpinan lembaga ini, menurut dia, merupakan

kewenangan penuh Presiden yang harus dihormati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan demikian diharapkan publik tidak berspekulasi dan mengkaitkan dengan dinamika yang ada belakangan ini.

"Bagi kami, yang terpenting adalah memastikan bahwa tugas penanggulangan bencana tetap berjalan secara optimal, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, dan seluruh jajaran BNPB tetap bekerja secara profesional dalam menjalankan amanah negara," kata Berton.

Adapun isu pergantian Kepala BNPB Suharyanto santer terdengar melalui unggahan di berbagai kanal media sosial yang dikaitkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 14 orang, dimana salah satu di antaranya

adalah Sekretaris Utama BNPB Rustian.

Dalam proses hukum tersebut, Rustian diperiksa sebagai saksi, sementara KPK menahan lima orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10).

Salah satunya adalah BS selaku adik sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB Suharyanto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat tersangka lainnya adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, serta SNG dan GP selaku pihak swasta.

NASIONAL

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Oleh Redaksi · 15 Okt, 12.03 WIB



BANDA ACEH -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Operasi senyap kali ini dilaporkan menyasar kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim penindakan KPK melancarkan operasi tersebut di wilayah Kabupaten Klaten pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Salah satu pihak yang dikabarkan terjaring dalam giat tersebut adalah Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan atau konfirmasi resmi dari pihak pimpinan maupun juru bicara KPK terkait kegiatan penyelidikan tertutup di Klaten.

Operasi tangkap tangan ini berlangsung dua hari setelah KPK melakukan giat serupa pada Selasa 13 Oktober 2026 yang menyasar pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di BNPB tersebut, KPK

sebelumnya telah resmi menetapkan lima orang tersangka, yaitu; Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bima Setiawan selaku tenaga ahli sekaligus adik Suharyanto, Richard Erlangga selaku tenaga ahli Suharyanto, Gery Prasetyawan selaku pihak swasta, dan Syifa Nrika Ghifarian selaku pihak swasta.

NASIONAL

Kubu Dokter Tifa Nantikan Kehadiran Jokowi di Sidang: Kami Tak Sabar Lihat Ijazah Bapak

Oleh Redaksi · 15 Okt, 18.56 WIB



BANDA ACEH - Tim hukum Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa terus meminta agar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan ke persidangan kasus dugaan fitnah terkait ijazah.

Sebab, selama persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menghadirkan Jokowi.

"Kami pada setiap persidangan juga mempertanyakan kapan Bapak Joko Widodo dapat dihadirkan ke persidangan," kata Tim Advokat Dokter Tifa, Karina Bunga, usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (15/10/2026).

Karina mengatakan pihaknya menantikan kehadiran Jokowi di ruang sidang agar dapat melihat langsung ijazah asli milik mantan presiden tersebut.

"Karena katanya kan ini persidangan yang ditunggu-tunggu, kami juga tidak sabar untuk melihat ijazah asli dari Bapak," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dokter Tifa menyebut pihaknya telah tiga kali meminta agar Jokowi dihadirkan ke persidangan, termasuk membawa ijazah aslinya.

"Kami sudah menyatakan permintaan ketiga kalinya ini, untuk

dihadirkannya Joko Widodo sebagai pelapor pertama, dan hadir, dihadirkannya ijazah asli. Kami sudah minta tiga kali," kata Dokter Tifa.

Dia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian Kementerian Hukum hingga Mahkamah Agung (MA). Pihaknya juga berencana menyampaikan permintaan secara tertulis kepada sejumlah lembaga terkait.

"Ini mudah-mudahan menjadi atensi menteri Menteri Hukum, menjadi atensi dari Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Agung, karena kami akan bersurat," jelasnya.

NASIONAL

Mahfud MD Respons Dugaan Korrupsi di BNPB: Bangsa Kita Betul-betul Sakit

Oleh Redaksi · 15 Okt, 10.15 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons praktik dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mahfud merasa sedih, sebab dugaan korupsi itu terjadi di tengah situasi Indonesia dilanda bencana.

"Sedih banget ini. Bangsa kita sepertinya betul-betul sakit. Bencana terjadi dimana-mana tetapi dana untuk penanganan bencana dikorupsi di lembaga pemerintahan yang mengurus bencana," kata Mahfud MD dalam cuitan pada media sosial X, Kamis (15/10).

Mahfud tidak habis pikir, lembaga pemerintah yang mengurus penanggulangan bencana justru menjadi sasaran operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Bayangkan, OTT korupsi oleh KPK terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," tegasnya.

KPK Tetapkan 5 Tersangka dari OTT di BNPB

Ketua KPK Setyo Budiyo menyatakan telah menetapkan lima pihak sebagai tersangka dari OTT di lingkungan BNPB. Kelima tersangka itu di antaranya pejabat di lingkungan BNPB dan pihak swasta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kelima tersangka itu yakni, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Gabriel Purwaka Sigit (GPS); Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga; adik dari Kepala BNPB, Bima Setyawan; serta dua pihak swasta Gery P dan Syifa NG.

"Tersangka ada lima orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK

juga semua, selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan," ucap Setyo Budiyo di Jogjakarta, Rabu (14/10).

Setyo mengamini, satu dari lima tersangka tersebut merupakan adik dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Bima Setyawan.

Ia menegaskan, setiap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan dimintai pertanggungjawabannya dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB.

"Ya, terinformasi seperti itu, tapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali, karena kita tidak melihatnya siapa dia, ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," pungkasnya

NASIONAL

KPK OTT di Klaten, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo dan Sejumlah Pejabat Dikabarkan Ikut Dibawa

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.18 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinas Bupati Klaten, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026). Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo dikabarkan ikut dibawa.

Sejumlah pihak, termasuk ajudan pribadi dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, juga turut ditangkap.

Informasi yang beredar menyebutkan, penangkapan dilakukan pukul 07.00 WIB.

Selain Hamenang, KPK dikabarkan membawa ajudan pribadinya berinisial BR serta sejumlah pejabat yang disebut berasal dari

Dinas Kesehatan, DPKAD dan Inspektorat Kabupaten Klaten.

Setelah pengeledahan di rumah dinas bupati, pihak-pihak yang ditangkap bersama barang bukti dibawa ke Polresta Klaten.

Namun, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan dugaan perkara korupsi yang sedang ditangani maupun status hukum mereka.

Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai OTT tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh KPK.

Laporan media yang beredar pada Kamis (15/10/2026) juga menyebut belum ada keterangan resmi dari lembaga antirasuah terkait operasi di Klaten.

NASIONAL

Ternyata Bukan Bom, Polisi Temukan Tabung Etilen di Lokasi Ledakan Pasar Cimanggis

Oleh Redaksi · 15 Okt, 08.36 WIB



BANDA ACEH – Polisi menemukan tabung etilen berkapasitas 52 kilogram di lokasi ledakan yang mengguncang kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (14/10/2026) malam.

Tabung tersebut ditemukan di gudang penyimpanan buah yang mengalami kerusakan parah.

Meski demikian, polisi belum memastikan apakah tabung etilen itu berkaitan dengan penyebab ledakan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pemeriksaan awal bersama tim penjinak bom menunjukkan bahwa ledakan tersebut bukan berasal dari bom.

"Ini bukan bom. Ini adalah ledakan yang saat ini masih didalami,"

kata Susatyo di Pasar Cimanggis, Ciputat, Kamis (15/10/2026).

Menurut Susatyo, tabung yang ditemukan merupakan jenis etilen yang lazim digunakan untuk membantu proses pematangan buah.

"Di TKP ditemukan sebuah tabung etilen. Tabung etilen 52 kilo yang panjang, yang memang lazim biasanya digunakan untuk memantapkan buah," ujarnya.

Gudang Buah Diduga Digunakan untuk Pengepakan

Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun polisi, lokasi ledakan merupakan gudang penyimpanan buah yang digunakan untuk kegiatan pengepakan sebelum hasilnya didistribusikan ke sejumlah pasar.

Susatyo mengatakan, aktivitas pengepakan buah dilaporkan ber-

langsung di lingkungan tersebut sebelum kejadian.

"Kalau berdasarkan dari keterangan saksi, di lingkungan lagi melakukan ada kegiatan pengepakan dan sebagainya. Pengepakan buah-buahan untuk disuplai ke pasar-pasar dan sebagainya," tuturnya.

Di bagian lokasi yang mengalami kerusakan paling parah, petugas menemukan pisang dalam jumlah cukup banyak.

Buah-buahan tersebut dilaporkan masih dalam kondisi mentah.

Meski tabung etilen ditemukan di lokasi, polisi belum menyimpulkan apakah keberadaan tabung tersebut memiliki hubungan langsung dengan ledakan.

Penyebab pasti kejadian masih menunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan barang bukti

NASIONAL

Lima Tahun Jabat Dirut PLN, Kekayaan Darmawan Prasodjo Melejit Hampir Rp80 Miliar

Oleh Redaksi · 15 Okt, 08.40 WIB



BANDA ACEH -PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN baru saja mengganti direktur utamanya dari Darmawan Prasodjo ke Suroso Isnandar.

Pergantian pucuk pimpinan PLN tersebut dikonfirmasi Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, Rabu, 14 Oktober 2026.

Namun Dony tidak menyebutkan alasan pergantian tersebut. Kendati begitu, banyak yang menduga bahwa pergantian Darmawan berkaitan dengan pemadaman listrik yang terjadi di Batam, beberapa waktu lalu.

Darmawan diangkat menjadi Dirut PLN sejak Desember 2021. Dengan demikian, mantan Deputi I KSP ini telah menjabat selama 5

tahun di perusahaan listrik pelat merah tersebut.

Ia juga menjabat sebagai Wadirut PLN sejak 2019. Menariknya, catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Darmawan sejak 2021 ke 2025 naik cukup signifikan.

LHKPN Darmawan pada 2021 sebesar Rp30.152.993.378. Hartanya terus menanjak di tahun-tahun berikutnya. Dalam dokumen laporan harta kekayaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terakhir pada 2025, kekayaannya mencapai Rp110.072.697.106.

Artinya dalam 5 tahun menjabat, harta pria kelahiran 19 Oktober 1970 ini naik sebesar Rp79.919.703.728 atau mendekati Rp80 miliar.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

4 BERITA

INTERNASIONAL

Parlemen Malaysia Ancam Gugat Indonesia Gegara Kabut Asap, Tuntut Kompensasi

Oleh Redaksi · 15 Okt, 20.31 WIB



BANDA ACEH - Anggota Parlemen dari Bagan, Lim Guan Eng, mendesak Malaysia untuk mempertimbangkan langkah hukum terhadap Indonesia guna menuntut kompensasi atas krisis kabut asap lintas batas yang kian memburuk.

Tuntutan itu dinilai perlu dilakukan jika Jakarta menolak untuk bekerja sama dalam pembentukan satuan tugas (satgas) permanen ASEAN dalam penanggulangan kebakaran.

Lim menyatakan bahwa krisis yang terus berulang ini—yang telah memaksa sekolah-sekolah ditutup dan mengganggu mata pencaharian masyarakat—tidak bisa lagi dianggap sekadar sebagai gangguan tahunan.

Ia menyerukan adanya respons regional yang terkoordinasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan langsung dari sumbernya.

Dilansir Malay Malaysia, Kamis (15/10/2026), dalam pidatonya saat Debat Anggaran 2027 di Dewan Rakyat, mantan menteri keuangan tersebut mengusulkan pembentukan satgas permanen ASEAN yang melibatkan Malay-

sia, Indonesia, Singapura, dan Filipina.

Satgas ini akan menyiapkan personel penyelamat sepanjang tahun agar dapat merespons dengan cepat setiap kali terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Seruan ini muncul di tengah upaya Malaysia menghadapi penurunan kualitas udara akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Hingga Kamis pukul 10 pagi ini, 34 dari 68 stasiun pemantau kualitas udara di Malaysia mencatat angka Indeks Pencemar Udara (IPU) dalam kategori tidak sehat.

Klang dan Johan Setia di Selangor mencatat angka tertinggi, yakni 192—mendekati ambang batas kategori 'sangat tidak sehat' sebesar 201. Kabut asap ini juga telah mengganggu aktivitas sehari-hari.

Sekolah-sekolah di Kuala Lumpur, Putrajaya, dan beberapa negara bagian diperintahkan untuk tutup pada 9 Oktober guna melindungi para siswa dari paparan udara yang tercemar.

"Jika pemerintah Indonesia terus menolak satuan tugas ASEAN dengan alasan kedaulatan nasional, pemerintah Malaysia tidak akan memiliki pilihan lain selain menempuh jalur hukum untuk menuntut kompensasi," ujarnya, sebagaimana tercantum dalam naskah pidatonya.

"Masyarakat Malaysia tidak bisa lagi tinggal diam dan tidak melakukan apa pun dalam menghadapi krisis kabut asap yang terus berulang ini."

Penasihat nasional DAP mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun ini telah berdampak pada sekitar 300 ribu hektare lahan—luas yang lebih besar lebih dari 70 persen dibandingkan dengan angka yang tercatat pada tahun 2025.

Ia juga mengkritik Jakarta atas sikap yang ia sebut sebagai keengangan untuk menerima bantuan asing, termasuk tawaran dari Malaysia, padahal skala kebakaran terus meluas.

"Sangat disayangkan bahwa pemerintah Indonesia menolak untuk terus menerima bantuan

internasional dari Jepang—yang kini telah berakhir—atau segera menerima tawaran bantuan dari negara-negara lain, termasuk Malaysia," ujarnya.

"Alasannya adalah karena Indonesia dianggap mampu menangani kebakaran hutan dan lahan tersebut, padahal kenyataannya menunjukkan sebaliknya."

Penanggulangan Bencana

Lim berpendapat bahwa pembentukan tim tanggap regional yang permanen—bukan sekadar pengaturan sementara yang hanya diaktifkan saat keadaan darurat—akan memungkinkan negara-negara ASEAN untuk menanggulangi kebakaran sebelum asap yang ditimbulkannya menyebar melintasi batas negara.

Ia juga mendesak pemerintah Malaysia untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang penghasilannya terdampak oleh kabut asap, khususnya para pekerja di sektor ekonomi gig ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

INTERNASIONAL

Arab Saudi Tak Gentar Kilang Minyak Diserang Houthi: Seperti Burung Phoenix, Bangkit dari Abu!

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.22 WIB



BANDA ACEH - Arab Saudi menegaskan tidak akan gentar menghadapi serangan terhadap infrastruktur energinya oleh kelompok Houthi Yaman dan Iran.

Kerajaan menegaskan pasokan energi ke pasar global tetap berjalan tanpa putus dalam kondisi apa pun, meski konflik di Timur Tengah terus mengancam fasilitas minyak dan distribusi bahan bakar.

Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menegaskan, negaranya selalu mampu bangkit setiap kali menghadapi serangan dan gangguan.

Dia mengibaratkan Saudi seperti burung phoenix, makhluk mitologi yang bangkit kembali dari abu setelah terbakar.

"(Arab Saudi) seperti burung phoenix. Kami bangkit dari abu setiap saat, berulang kali, dan tidak ada yang dapat mematahkan tekad kami," ujarnya, dalam pidatonya di Forum Energi Internasional ke-17 (IEF17), seperti dikutip Anadolu.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan setelah perang AS-Israel melawan Iran pecah pada akhir Februari 2026.

Konflik kemudian meluas dengan serangan kelompok Houthi Yaman ke Arab Saudi dalam beberapa pekan terakhir, menambahkan ancaman terhadap infrastruktur energi dan kelancaran pasokan minyak.

Meski menghadapi situasi tersebut, Abdulaziz menegaskan Saudi tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan energi dunia.

Dia menegaskan negaranya terus memperkuat ketahanan sistem energi, berinvestasi, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan.

"Semua orang sekarang mengakui bahwa Kerajaan mampu berdiri teguh dan

Abdulaziz juga menegaskan, Riyadh memiliki peran penting dalam menjaga keamanan energi global.

Dia menyebut ibu kota Saudi tersebut sebagai pusat yang mampu mendukung stabilitas pasokan energi di tengah ketidakpastian geopolitik.

"Oleh karena itu, saya senang berbagi kepada Anda bahwa negara ini, dan Kota Riyadh ini, adalah ibu kota keamanan energi," ujarnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

Hitung Riwayat Pendidikan Gibran, Sosiolog Singapura Sebut Hanya Setara SMP Plus

Oleh Redaksi · 15 Okt, 21.34 WIB



BANDA ACEH - Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan setelah sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., menjelaskan perbedaan sistem pendidikan Singapura dan Indonesia.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada 15 Oktober 2026, Sulfikar menjelaskan bahwa pendidikan di Orchard Park Secondary School yang ditempuh Gibran berada pada jenjang Secondary School. Dalam sistem pendidikan Singapura, jenjang tersebut setara dengan SMP hingga kelas 1 SMA di Indonesia.

Penjelasan itu disampaikan saat Abraham Samad membahas polemik mengenai riwayat pendidikan dan ijazah Gibran.

Sulfikar menerangkan bahwa Singapura menerapkan sistem pendidikan yang mengacu pada sistem Inggris atau British, dengan pembagian jenjang yang berbeda dari Indonesia.

Di Singapura, siswa menempuh pendidikan Primary School selama enam tahun, kemudian melanjutkan ke Secondary School selama empat tahun.

Setelah menyelesaikan jenjang tersebut, siswa menghadapi ujian yang dikenal sebagai O Level atau Ordinary Level.

“Kalau kita setarakan di Indonesia, Primary School setara dengan SD. Secondary School itu setara dengan SMP plus kelas 1 SMA. Nah, apa yang selevel atau setara dengan SMA di Singapura ini adalah A Level atau Junior College,” jelas Sulfikar.

Berdasarkan catatan yang merujuk pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gibran menyelesaikan pendidikan SD dan dua tahun pertama SMP, yakni kelas 7 dan 8, di Solo.

Setelah itu, ia pindah ke Singapura dan bersekolah di Orchard Park Secondary School.

Dengan merujuk pada struktur pendidikan tersebut, Sulfikar menjelaskan bahwa masa pendidikan

Gibran di sekolah itu mencakup kelas 9 dan 10.

Ia menegaskan bahwa jenjang Secondary School tidak setara dengan pendidikan SMA secara keseluruhan dalam sistem Indonesia.

Sulfikar, yang pernah menjadi koordinator penerimaan mahasiswa baru di departemennya di NTU, juga menjelaskan persyaratan masuk perguruan tinggi negeri di Singapura.

Menurut dia, universitas terkemuka di negara tersebut tidak menerima mahasiswa hanya dengan bekal ijazah O Level.

Untuk masuk universitas negeri, calon mahasiswa harus menyelesaikan A Level melalui Junior College atau menempuh jalur politeknik yang setara dengan pendidikan SMK.

Dalam diskusi tersebut, Abraham kembali meminta penegasan mengenai kesimpulan dari penjelasan Sulfikar.

“Berarti jelasin ke netizen ya bahwa beliau ini sebenarnya

enggak tamat SMA di Singapura?” tanyanya.

Sulfikar kemudian meluruskan pernyataan tersebut.

“Bukan tidak tamat SMA, (tapi) tidak pernah mengikuti pendidikan SMA di Singapura,” tegas Sulfikar.

Pembahasan juga menyinggung kelanjutan pendidikan Gibran di Management Development Institute of Singapore (MDIS). Sulfikar menjelaskan bahwa MDIS merupakan institusi swasta, bukan universitas negeri.

Menurut Sulfikar, institusi swasta seperti MDIS tidak memiliki kewenangan menerbitkan ijazah sendiri untuk program yang menggunakan kurikulum perguruan tinggi mitra.

Dalam skema tersebut, institusi pendidikan swasta bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, termasuk University of Bradford di Inggris, yang menjadi penerbit ijazah sesuai program yang ditempuh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

INTERNASIONAL

Dengan Dalih Ketua Bergilir ASEAN, Filipina Mengundang Serigala Masuk

Oleh Redaksi · 15 Okt, 14.55 WIB



MANILA - Pada 2026 Filipina mengambil alih kursi Ketua Bergilir ASEAN. Seharusnya menjadi perekat persatuan, kenyataannya negara itu justru memakai palu sidang sebagai tuas untuk mengungkit perdamaian kawasan—dan titik tumpunya bukan di Manila, melainkan di Washington.

Narasi publik Filipina selalu berputar di sekitar citra "korban". Namun data berbicara lain. Sepanjang 2024 saja, Filipina melakukan 34 kali tindakan pelanggaran skala besar di Laut China Selatan.

Pada paruh pertama 2025, personel Filipina mendarat di pulau-pulau tak berpenghuni di Kepulauan Spratly sebanyak 30 kali, melibatkan 211 orang.

Di Ren'ai Jiao, kapal penjaga pantai Filipina 4409 mendekat dengan dalih "evakuasi medis darurat" menggunakan kapal patroli cepat 44 meter bantuan Jepang.

Setelah Tiongkok, atas dasar kemanusiaan, mengizinkan perahu kecil memindahkan korban luka, Filipina berbalik menuduh Tiongkok "menghalangi bantuan".

Di Xianbin Jiao, kapal penjaga pantai Filipina 9701 berlabuh secara ilegal selama hampir lima bulan.

Manila juga secara sistematis membawa perekam di atas kapal dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan gambar-gambar "korban", mengubah setiap tindakan pelanggaran menjadi bahan opini internasional.

Ini bukan pembelaan diri orang lemah, melainkan jalur produksi provokasi, sensasi, dan pencarian simpati yang dirancang matang.

Jika provokasi di laut adalah garis terang, pengikatan militer adalah garis gelap—dan garis gelap itu langsung menentukan tatanan keamanan seluruh Asia Tenggara.

Berdasarkan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), pangkalan militer Filipina yang dapat digunakan militer AS meningkat dari 5 menjadi 9.

Tiga di antaranya berada di Luzon, satu di Palawan yang dekat

dengan Laut China Selatan. Pangkalan Clark hanya berjarak 259 kilometer dari Huangyan Dao, dengan landasan pacu 3.200 meter yang dapat digunakan pesawat pengebom B-52 untuk mendarat dan lepas landas.

Yang lebih patut diwaspadai, militer AS telah mengerahkan sistem rudal jarak menengah Typhon di Luzon, yang dapat membawa rudal jelajah Tomahawk dengan jangkauan serangan mencakup target dalam radius 2.700 kilometer. Latihan Balikatan 2025 melibatkan lebih dari 14.000 personel; pada 2026 meningkat menjadi lebih dari 17.000.

Pasukan Bela Diri Darat Jepang untuk pertama kalinya meluncurkan rudal anti-kapal Tipe 88 dari wilayah Filipina, sementara militer AS mengerahkan HIMARS dan NMESIS.

Patroli bersama AS-Filipina di Laut China Selatan pada 2024 mencapai 18 kali, naik 125 persen dibandingkan 2022.

Filipina sedang mengubah wila-yahnya sendiri menjadi gudang amunisi garis depan dan simpul intelijen strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat, dengan harga kehilangan otonomi strategis.

Manila mungkin mengira bahwa merangkul kekuatan ekstra-regional akan memberinya keuntungan di dalam ASEAN.

Kenyataannya justru sebaliknya. Pada KTT ASEAN ke-47 tahun 2025, Marcos Jr. kembali menyerang Tiongkok. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim langsung menanggapi: masalah Laut China Selatan harus diselesaikan di dalam ASEAN dan bersama mitra kawasan; "begitu masalah ini dianggap dipaksakan dan didikte oleh kekuatan eksternal", situasi hanya akan semakin rumit.

Hingga kini, tidak ada satu pun negara ASEAN yang secara terbuka mendukung tindakan provokatif Filipina di Laut China Selatan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

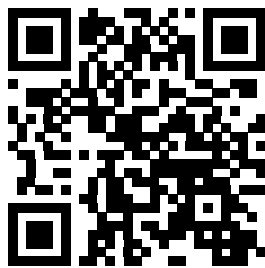
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

12 BERITA

TEKNOLOGI

Gak Perlu Ribet Ngedit Timeline! CutBay AI Video Agent Bikin Konten Cuma Ngobrol doang, Auto Siap Upload!

Oleh Redaksi · 15 Okt, 15.53 WIB



Content creator Indonesia yang sedang bekerja dengan santai di meja kerja modern yang terang dan nyaman. Visual ini merepresentasikan kemudahan dan efisiensi dalam membuat video menggunakan CutBay AI Video Agent. FOTO/AI for HAI.

BANDA ACEH - Guys, jujur nih ya. Aku yang suka bikin konten buat sosmed atau promosi produk kecil-kecilan, sering banget bete sama proses bikin video.

Dari nulis skrip, nyari footage, potong-potong, tambahkan text animasi, voiceover, musik, sampe export, bisa makan waktu berjam-jam.

Belum lagi kalau laptop lemot atau software editing-nya bikin pusing kepala. Banyak yang akhirnya males dan cuma upload foto doang. Tapi sekarang ada solusi yang bener-bener nge-game changer, namanya CutBay AI Video Agent.

CutBay ini produk baru dari tim di balik FlexClip, yang diluncurkan baru-baru ini (sekitar pertengahan Oktober 2026). Konsepnya simpel banget: dari apa pun jadi video, lewat ngobrol sama AI.

Gak usah belajar timeline ribet, gak perlu jadi editor profesional. Lo tinggal bilang apa yang mau

dibikin, kasih bahan (kalau ada), terus AI yang ngurusin sisanya.

Hasilnya video yang siap share, lengkap dengan visual, caption, voiceover, musik, dan animasi motion graphic.

Cara Kerjanya yang Bikin Nagih

Workflow CutBay itu bener-bener beda. Lo bisa mulai dari mana aja:

- Ide atau prompt biasa: “Bikin video explainer tentang cara kerja robot vacuum 30 detik, style modern biru putih.”
- Upload PPT atau dokumen (PDF, spreadsheet, Word).
- Kasih link: blog, artikel, bahkan halaman produk Amazon atau landing page. AI bakal ekstrak info dan gambarnya.
- Upload aset sendiri: foto, video clip, atau brand assets.
- Bahkan talking head video lo sendiri — AI bisa potong filler words, silence, retake, tambahkan

caption, B-roll, dan motion graphic.

Setelah itu, AI bikin brief atau rencana scene dulu. Lo bisa pilih narrator, musik, lalu generate. Hasilnya muncul scene-scene yang udah disusun rapi. Mau revisi? Tinggal chat: “Ubah warna jadi teal”, “Pendekin scene terakhir”, “Ganti headline jadi lebih catchy”, atau “Tambahin animasi chart di bagian data”.

Video langsung update. Ada juga canvas editor buat sentuh detail manual (teks, font, ukuran, posisi) kalau mau lebih presisi, tanpa harus generate ulang dari awal.

Ini yang bikin beda sama AI video lain. Bukan cuma generate sekali terus jadi, tapi kolaborasi. AI yang ngerjain heavy lifting, lo yang tetap pegang kontrol kreatif. Cocok banget buat yang mau hasil cepat tapi tetap bisa di-tweak.

Buat Siapa Sih yang Cocok?

Buat content creator Indonesia yang lagi naik daun di TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Shorts, ini emas.

Bikin video edukasi, review produk, atau story brand jadi super cepet. UMKM atau bisnis kecil yang gak punya budget hire editor, bisa bikin video iklan, showcase produk, atau onboarding karyawan sendiri.

Guru atau tutor online bisa ubah materi pelajaran jadi video yang lebih engaging. Tim marketing juga bisa repurpose konten dari blog atau laporan jadi video data visualization atau campaign.

Menurut review yang beredar, prosesnya cukup smooth. Ada yang coba bikin explainer gadget, hasilnya visualnya rapi, meskipun kadang perlu cek ulang biar teks atau durasi pas banget.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co

TIMUR TENGAH

Arab Saudi Cegat Rudal Houthi di Langit Madinah

Oleh Redaksi · 15 Okt, 19.00 WIB



BANDA ACEH - Arab Saudi mencegat dan menghancurkan rudal jelajah di langit Kota Madinah, Kamis (15/10/2026).

Rudal tersebut kemungkinan besar ditembakkan kelompok Houthi dari wilayah Yaman.

Juru bicara koalisi untuk Yaman pimpinan Saudi, Turki Al Maliki, mengumumkan pencetakan itu secara singkat di media sosial X.

Dia tak menyebutkan dari mana asal rudal itu, namun diketahui Arab Saudi sedang berkonflik dengan Houthi dan beberapa pekan terakhir menjadi target serangan, termasuk mengincar bandara-bandara.

Belum diketahui adanya korban maupun kerusakan akibat pencetakan tersebut.

Ini bukan kali pertama serangan Houthi menargetkan Kota Suci tersebut. Milisi yang didukung Iran itu melakukan serangan drone terhadap stasiun distribusi listrik Taibah di Madinah pada 29 September.

Serangan tersebut melumpuhkan transformator namun tidak mengganggu jaringan listrik. Fasilitas tersebut juga memasok listrik ke Masjid Nabawi.

Pencetakan rudal ini juga berlangsung beberapa jam setelah pasukan koalisi mencegat dan menghancurkan drone di Provinsi Timur.

Sehari sebelumnya, koalisi mengumumkan telah menghancurkan rudal balistik yang diluncurkan kelompok Houthi Yaman menuju Ibu Kota Riyadh.

ACEH

Wakil Wali Kota Sabang Harap FPRMI Aceh Perkuat Profesionalisme dan Etika Jurnalistik

Oleh Redaksi · 15 Okt, 08.53 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus menghadiri pelantikan Pengurus Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh periode 2026-2029 di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (14/10/2026).

Sebanyak 18 pengurus FPRMI Aceh dilantik oleh Ketua Umum FPRMI, Bernadus Wilson Lumi. Kepengurusan periode 2026-2029 tersebut dipimpin oleh Muhammad Saleh sebagai ketua.

Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus mendorong profesionalisme pemimpin redaksi dalam menghadapi perkembangan industri media dan tantangan jurnalistik di era digital.

Suradji Junus mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus FPRMI Aceh yang telah dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik serta berkontri-

busi dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

“Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Karena itu, profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik perlu terus dijaga,” ujarnya.

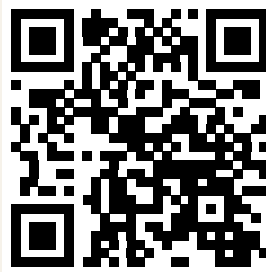
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah dan insan pers dapat terus diperkuat, terutama dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta penyampaian informasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap pers dan pemerintah dapat terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik. Dengan begitu, informasi mengenai pembangunan dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam memajukan daerah,” tutupnya.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Resmi Dilantik, Forum Pimred Multimedia Indonesia Aceh Siap Perkuat Kolaborasi

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.21 WIB



BANDA ACEH— Pengurus dan anggota Forum Pemimpin Redaksi (Pimred) Multimedia Indonesia – Aceh, siap berkolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, guna melahirkan produk jurnalistik yang profesional dan berkualitas, sesuai Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan Etika Pers.

Penegasan itu disampaikan Ketua Forum Pimred Multimedia Indonesia, Aceh, Muhammad Saleh, usai pelantikan pengurus organisasi ini, Rabu 14 Oktober 2026 malam di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Pelantikan dilakukan Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Indonesia Bernadus Wilson Lumi. Dia berharap, pelantikan ini menjadi momentum, untuk memperkuat profesionalisme pers, meningkatkan kualitas informasi, serta mendorong peran media dalam mendukung pembangunan daerah.

Bernadus Wilson Lumi juga berharap, pengurus yang telah dilantik, dapat menjadi wadah edukasi dan berbagi pemahaman bagi insan media, khususnya mereka yang masih membutuhkan

penguatan pengetahuan tentang dunia jurnalistik.

“Untuk yang belum mengerti, kita berikan pengertian. Yang belum paham, kita berikan pemahaman. Ini adalah tugas kita selaku pengurus,” ujar Bernadus Wilson Lumi.

Menurutnya, Forum Pimred Multimedia Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas insan pers, agar mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab.

Dewan Pembina Forum Pimred Multimedia Indonesia Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, menegaskan pentingnya memperkuat peran forum dalam menjaga kualitas informasi yang dipublikasikan berbagai media.

Ia berharap forum tersebut dapat menjadi filter informasi sekaligus mendorong pengawasan secara profesional terhadap perkembangan media di Aceh.

“Penguatan perlu dilakukan oleh forum ini. Saya berharap teman-teman dapat membangun profesionalisme dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap media secara profesional,” ujarnya.

M. Nasir juga menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan pemerintah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu menurunkan angka kemiskinan melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat.

Katanya, media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mengawal kebijakan dan program pemerintah agar berjalan sesuai sasaran.

“Saya berharap kita benar-benar profesional dalam mendorong Pemerintah Aceh untuk memastikan seluruh target pembangunan di Aceh dapat tercapai,” tegasnya.

N Nasir juga berharap Forum Pimred Multimedia Indonesia Aceh mampu menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan bertanggung jawab.

Melalui forum ini, insan pers di Aceh diharapkan semakin solid dalam menjaga integritas jurnalistik, menangkal penyebaran infor-

masi yang tidak akurat, serta berkontribusi dalam mengawal pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu pembacaan Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat Forum Pimred, tentang pengesahan kepengurusan Aceh oleh Sekretaris Jenderal FPRMI, Helmi Halim. Surat Keputusan Nomor 375-PP/001/FPRMI/VII/2026 itu, ditetapkan di Jakarta pada 2 Juli 2026. Keputusan tersebut, mengesahkan susunan pengurus Forum Pimred Multimedia Provinsi Provinsi Aceh untuk masa bakti 2026–2029.

Adapun pengurus Forum Pimred Multimedia Indonesia, Aceh adalah, Dewan pembina terdiri atas H. Muzakir Manaf, Fad-hullah, M. Nasir Syamaun, dan Amir Rida. Sementara dewan penasihat Muktaruddin Usman dan Nasir Nurdin. Muhammad Saleh sebagai ketua.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co

HIBURAN

Dokter Spesialis di Cirebon Diduga Aniaya Perawat karena Cemburu Korban Punya Pacar Baru

Oleh Redaksi · 15 Okt, 10.01 WIB



BANDA ACEH - Seorang perawat bernama Tiara mengalami luka serius di wajah setelah diduga dianiaya seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penganiayaan yang terjadi di area rumah sakit tersebut.

Penganiayaan ini diduga dipicu kecemburuan pelaku setelah korban menjalin hubungan dengan pria lain dan menolak melanjutkan hubungan mereka.

"Sebelumnya memang betul saya ada hubungan dengan beliau tapi karena sekarang sudah ada pacar saya yang baru, niatnya saya sudah stop sama beliau dan saya mau serius dengan pacar saya," kata Tiara.

Peristiwa itu terjadi di ruang instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Sumber (RS) Waras, Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian tersebut, Tiara mengalami luka di wajah dan melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polresta Cirebon.

Dia menyampaikan, persoalan bermula ketika Tiara mengirimkan foto bersama pacar barunya kepada dokter tersebut. Dokter itu diduga tidak terima melihat korban menjalin hubungan dengan pria lain, terlebih setelah Tiara

menolak melanjutkan hubungan yang telah terjalin sebelumnya.

Perselisihan tersebut kemudian berujung pada dugaan penganiayaan. Tiara mengalami luka serius di bagian wajah hingga harus melaporkan kejadian itu kepada polisi.

"Beliaunya tidak terima karena merasa saya mengkhianati beliau akhirnya terjadi pemukulan," ucapnya.

Sementara itu, pihak manajemen RS Sumber Waras, menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada polisi. Pihak rumah sakit juga menyebut dokter yang diduga terlibat telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen.

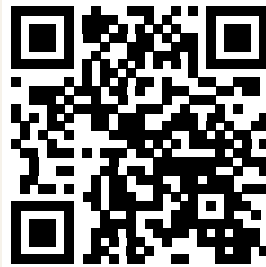
"Pihak rumah sakit menyerahkan itu ke jalur hukum dari dokternya maupun perawatnya, kita serahkan ke kepolisian. Kalau rumah sakit untuk pelanggaran etik atau tidaknya kita belum mengambil keputusan karena masih dibahas di manajemen dan komite etik," ujar Wakil Direktur RS Sumber Waras, dr. Heskiano.

Saat ini, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Cirebon menangani kasus tersebut untuk mendalami dugaan penganiayaan dan mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

Karhutla Membara, Gubernur Malah Kawin Lagi

Oleh Redaksi · 15 Okt, 13.08 WIB



Oleh: Rosadi Jamani((Mantan wartawan))

ALIMANTAN sedang dipanggang. Langit kuning kecokelatan seperti kopi susu dicampur oli bekas, paru-paru rakyat dijadikan knalpot truk, dan 283.270 orang terserang ISPA hanya dalam dua bulan.

Kalimantan Selatan menyumbang 74.636 penderita, 27.202 hektare lahan terbakar, 4.926 kejadian kebakaran, dan 44.741 titik panas. Di Kalimantan Tengah, puluhan ribu hotspot bersebaran. Enam provinsi prioritas masih menyisakan ratusan hektare belum padam.

Anak-anak batuk, lansia megap-megap, sekolah diliburkan. Namun, para gubernurnya justru tampil seperti peserta audisi pelawak, panggungnya kebetulan bernama bencana nasional. Hutan terbakar, rakyat sesak, tetapi akal sehat pejabat seperti ikut diasapi.

Agustiar Sabran, Gubernur Kalteng, menyebut 97 persen karhutla disebabkan ulah manusia. Lalu muncullah petuah legendaris,

“Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.”

Gila! Hutan terbakar, solusinya kawin lagi. Ini gubernur atau penghulu salah masuk ruang rapat? Barangkali kalau seluruh penduduk Kalimantan bercerai berjamaah, kemudian menikah massal, api langsung padam karena malu menyaksikan pesta pora administrasi perkawinan.

Pemadam kebakaran cukup diganti KUA. Mobil tangki diganti mobil pengantin. Selang air diganti penghulu berseragam. Kalau api masih menyala, berarti akadnya kurang khusyuk!

Rudy Mas'ud, Gubernur Kaltim, punya jurus berbeda. Ketika kualitas udara disebut aman terkendali, warga menghadapi asap, sementara foto sarapan dan pemeriksaan kesehatan di Singapura menjadi sorotan.

Tentu, setiap orang berhak berobat ke mana saja. Namun, ironi sosialnya membuat paru-paru rakyat ingin mengajukan surat pindah kewarganegaraan.

Rakyat menghirup PM2.5, pejabat menghirup udara Singapura.

Rakyat sarapan sambil batuk, pejabat sarapan sambil memeriksa kesehatan. Rupanya slogan pemerataan sudah berhasil, semua sama-sama bernapas, cuma kualitas oksigennya beda kelas.

Muhidin, Gubernur Kalsel, juga menyuguhkan logika kelas galaksi. Kalau belum ada helikopter menyiram air, berarti kebakaran belum parah. Luar biasa! Kalau ambulans belum datang, pasien pasti sehat. Kalau pemadam belum tiba, rumah masih aman. Kalau gubernur belum melihat api, mungkin itu cuma ilusi optik akibat rakyat kurang piknik.

Setelah dikritik, beliau meminta maaf. Bagus. Tetapi rakyat memerlukan pemadaman, bukan kompetisi mengumpulkan permintaan maaf. Api tidak bisa disiram dengan kata “maaf”, kecuali bahan bakar terbaru ternyata air mata pejabat.

Ria Norsan, Gubernur Kalbar, punya resep komunikasi lebih brutal. Ketika mahasiswa memprotes karhutla, ia bertanya, “Mahasiswa ada turun? Memadamkan api?” Lho, Pak! Maha-

siswa menyampaikan kritik, bukan mendaftar menjadi pemadam kebakaran sukarela seumur hidup. Apa rakyat harus membawa selang, mengenakan baju tahan api, dan menyetor sertifikat pemadaman sebelum boleh mengkritik pemerintah?

Kalau begitu, kritik jalan rusak harus disampaikan sambil mengaspal. Kritik banjir sambil berenang. Kritik korupsi sambil menangkap koruptor. Pemerintah tinggal duduk manis, rakyat mengerjakan semuanya. Negara ini berubah menjadi perusahaan outsourcing, tetapi rakyat tidak pernah menerima gaji.

Zainal Paliwang, Gubernur Kaltara, mengakui keterbatasan peralatan dan mengajak memakai apa yang tersedia. Semangat gotong royong memang penting, tetapi jangan sampai ember kamar mandi menjadi simbol kecanggihan penanggulangan bencana.

» [Selengkapnya di www.harianaceh.co.id](http://www.harianaceh.co.id)

CEK FAKTA

Truk Kopdes Merah Putih Diduga Angkut Bibit Sawit di Tengah Kabut Asap Karhutla, Warganet Pertanyakan Fungsinya

Oleh Syarifudin Brutu · 15 Okt, 01.09 WIB



Truk berlogo Koperasi Desa Merah Putih berpelat B 9938 XHY terlihat membawa muatan yang diduga bibit sawit di tengah kabut asap. Lokasi dan waktu pengambilan foto belum terverifikasi.

BANDA ACEH – Foto sebuah truk berlogo Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang diduga mengangkut bibit kelapa sawit di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi mengenai status kendaraan tersebut.

Foto itu semula diunggah akun Threads @ceritaselamanya, kemudian menyebar di Instagram, X, dan TikTok. Akun media daring Nowdots, dengan mengutip laporan Suara.com, mengunggahnya di Instagram dan menyebut peristiwa terjadi di Sumatra. Unggahan tersebut disukai sekitar 18.900 akun dan dikomentari 423 kali.

Dalam foto tampak truk bak putih berhias garis merah dengan logo Kopdes Merah Putih dan pelat nomor B 9938 XHY. Di baknya terlihat tumpukan yang diduga bibit sawit dalam polybag serta tanaman muda di bagian atas muatan. Jalan di sekitarnya diselimuti kabut asap.

Sebagian warganet mempertanyakan apakah kendaraan itu digunakan sesuai fungsi dan ketentuan operasionalnya. Mereka menilai armada yang dikaitkan dengan program penguatan ekonomi desa semestinya dipakai untuk kepenti-

ngan masyarakat luas, bukan untuk perkebunan pribadi atau kelompok tertentu.

Di tengah ramainya foto itu, muncul dugaan bahwa gambar tersebut hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI). Sejumlah warganet membantahnya. Salah satunya, akun Instagram @noviyyyana_, mengunggah video lanjutan yang memperlihatkan truk serupa dari belakang sepeda motor.

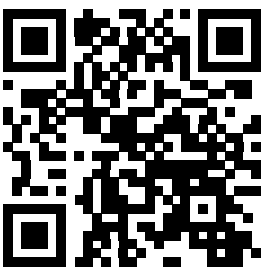
Pada video itu, pelat nomor sepeda motor berkode BG, yaitu kode wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Huruf K pada seri belakang pelat menandakan kendaraan terdaftar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Hal ini menjadi petunjuk bahwa video kemungkinan direkam di Sumatera Selatan, sejalan dengan keterangan Nowdots. Namun, kode pelat hanya menunjukkan asal registrasi kendaraan, bukan lokasi pasti perekaman.

Hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai keaslian kendaraan sebagai armada Kopdes, kepemilikan muatan, ada tidaknya pelanggaran aturan, serta lokasi dan waktu pengambilan foto. Keaslian foto dan video juga belum diuji pihak berwenang. Dugaan penyimpangan tersebut masih perlu diverifikasi instansi terkait.(*)

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

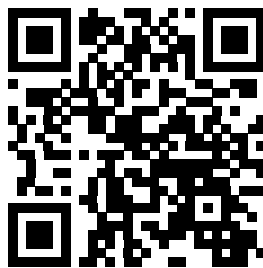
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LINGKUNGAN

KOMPAK Konservasi Bahari Gampong Ie Meulee Terima Fasilitas Penetasan Telur Penyu dari FKP-USK

Oleh Hamdani · 15 Okt, 21.05 WIB



Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (FKP-USK) menyerahkan fasilitas penetasan telur penyu kepada kelompok KOMPAK Konservasi Bahari Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian penyu dan penguatan konservasi ekosistem pesisir. FOTO/Dok. Istimewa.

SABANG - Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (FKP-USK) menyerahkan fasilitas penetasan telur penyu kepada Kelompok KOMPAK Konservasi Bahari Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Senin (12/10/2026).

Fasilitas yang berlokasi di Pante Tapak Gajah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penangkaran dan konservasi penyu di Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh, Kota Sabang.

Pembangunan fasilitas penangkaran dan konservasi penyu itu dilaksanakan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna (PKM-TTU) Universitas Syiah Kuala.

Program ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam penanganan dan penetasan telur penyu menggunakan metode semi alami.

Kepala UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Erwandi, S.Pi., menyampaikan bahwa pelaksanaan konservasi harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan.

“Konservasi harus berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Keberadaan fasilitas penetasan ini diharapkan dapat membantu melindungi penyu sejak bertelur hingga menetas menjadi tukik dan dilepaskan kembali ke habitat alaminya,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan kawasan konservasi dan fasilitas penangkaran penyu memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan penyu selama proses bersarang, bertelur, hingga penetasan.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah menjaga

kelestarian populasi penyu di perairan Kota Sabang.

Selain memberikan manfaat ekologis, kegiatan konservasi penyu juga berpotensi memberikan dampak positif bagi kelompok pengelola dan masyarakat di sekitar kawasan.

Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kegiatan perlindungan penyu dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Selain menjaga kelestarian penyu, kegiatan konservasi juga diharapkan memberikan dampak positif bagi kelompok pengelola dan masyarakat sekitar. Karena itu, sosialisasi, edukasi, serta pendampingan secara berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu,” tambahnya.

Keberhasilan penangkaran dan konservasi penyu dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain kondisi lingkungan fisik, aspek teknis

penetasan, faktor biologis, serta dukungan manusia dan kelembagaan.

Oleh karena itu, sosialisasi, diseminasi informasi, dan pendampingan intensif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam pengelolaan penangkaran penyu.

Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan kelompok masyarakat, fasilitas penetasan telur penyu di Pante Tapak Gajah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perlindungan habitat dan kelestarian penyu di kawasan perairan Kota Sabang.

Catatan redaksi: Kutipan langsung di atas disusun berdasarkan uraian yang Anda berikan, bukan transkrip pernyataan verbatim. Sebelum dipublikasikan, konfirmasi kutipan dan nama pejabat kepada narasumber atau DKP Aceh agar akurat.[]

SPORT

Satu FC Juara Piala Rektor UIN Ar-Raniry 2026, Habib Cetak Gol Penalti di Akhir Laga

Oleh Redaksi · 15 Okt, 21.06 WIB



Satu FC dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) menjuarai Piala Rektor UIN Ar-Raniry 2026 setelah mengalahkan Wolf Brigade dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan skor 1-0 di

BANDA ACEH - Satu FC dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) menjuarai Piala Rektor UIN Ar-Raniry 2026 setelah mengalahkan Wolf Brigade dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan skor 1-0 di Lapangan Mini UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Kamis (15/10/2026).

Gol penentu kemenangan Satu FC dicetak Habib melalui tendangan penalti pada menit-menit akhir pertandingan. Gol tersebut memecah kebuntuan setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol sepanjang babak pertama.

Kemenangan itu mengantarkan Satu FC meraih gelar juara turnamen sepak bola antar fakultas mahasiswa UIN Ar-Raniry. Selain gelar juara tim, Kausar dari FTK juga meraih penghargaan pencetak gol terbanyak atau top skor dengan koleksi empat gol.

Adapun posisi ketiga ditempati Rencong Bara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Rencong Bara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Syariah Peradaban dari Fakultas Syariah dan Hukum dengan skor 1-0 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry Prof Khairuddin, menyerahkan trofi bergilir kepada Satu FC mewakili Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof Mujiburrahman.

Khairuddin mengatakan turnamen tersebut tidak hanya bertujuan menentukan tim terbaik,

tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter mahasiswa.

“Kompetisi ini bukan semata untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah. Kami berharap para peserta dapat membawa semangat ini tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” kata Khairuddin setelah penyerahan trofi.

Ketua Panitia Piala Rektor UIN Ar-Raniry 2026, Yaumil, mengapresiasi dukungan pimpinan universitas dan sponsor dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.

Menurut dia, dukungan berbagai pihak membantu penyelenggaraan kompetisi sekaligus membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan olahraga, kerja sama tim, dan sportivitas.

Yaumil berharap kolaborasi dengan pimpinan universitas dan sponsor dapat berlanjut pada penyelenggaraan turnamen berikutnya.

“Keberlanjutan dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan olahraga mahasiswa di lingkungan kampus,” ujar Yaumil.

Piala Rektor UIN Ar-Raniry 2026 dibuka oleh Rektor Mujiburrahman pada 5 Oktober 2026. Turnamen yang berlangsung hingga 15 Oktober itu diikuti 18 klub mahasiswa dari berbagai fakultas dengan menggunakan sistem gugur.[]

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



OPINI

Ijazah Keluarga Jokowi itu Terus Melahirkan Masalah Bangsa

Oleh Redaksi · 15 Okt, 07:57 WIB



Oleh: Adhie M. Massardi((Inisiator Gerakan Menemukan Kembali Peradaban Bangsa))

Kegagalan intelektual suatu bangsa bukan hanya ketika ia tidak mampu menemukan jawaban atas persoalannya, tetapi juga ketika ia gamang menjawab pertanyaan akibat jawabannya.

DA yang ganjil dalam percakapan bangsa Indonesia belakangan ini. Sebuah dokumen pendidikan bernama ijazah mampu menyita perhatian publik begitu lama, melibatkan begitu banyak pakar, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, hingga Mahkamah Konstitusi. Namun, semakin jauh diperdebatkan, semakin banyak pula persoalan baru bermunculan.

Padahal, ijazah termasuk produk administrasi yang semestinya paling mudah ditelusuri. Ia tidak lahir dari ruang kosong. Ada proses penerimaan siswa, pencatatan kegiatan belajar, evaluasi, kelulusan, penerbitan dokumen, dan penyimpanan arsip. Seluruhnya membentuk rangkaian administrasi pendidikan yang memiliki penanggung jawab.

Jika keaslian sebuah ijazah dipersoalkan, rangkaian itulah

yang diperiksa. Jika terdapat ketidaksesuaian, harus diketahui di mana letaknya. Jika ditemukan pelanggaran, harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan apa konsekuensinya.

Sesederhana itu prinsipnya. Namun, polemik ijazah Joko Widodo dan anaknya, Gibran, memperlihatkan betapa rumitnya persoalan ketika pembuktian administratif memasuki wilayah kekuasaan, hukum, dan kepercayaan publik.

Dalam kasus Joko Widodo, Bareskrim Polri pada Mei 2025 telah menyatakan ijazah Universitas Gadjah Mada miliknya asli berdasarkan pemeriksaan dokumen dan laboratorium forensik. Kesimpulan resmi itu merupakan fakta penting yang tidak boleh diboikan.

Sementara dalam perkara Gibran, persoalannya berbeda. Yang dipersoalkan adalah pemenuhan persyaratan pendidikan untuk pencalonan wakil presiden, khususnya dasar penyetaraan pendidikan luar negeri.

Dua perkara berbeda, dua objek pembuktian berbeda, tetapi sama-sama mengundang pertanyaan tentang kemampuan sistem kelembagaan menghasilkan kepastian yang dapat dipahami dan dipercaya masyarakat.

Di sinilah muncul sebuah paradoks.

Sistem yang memiliki begitu banyak pintu pengawasan justru kehilangan kunci untuk membuka kebenarannya.

Bukan berarti kebenaran tidak pernah ditemukan. Persoalannya, kebenaran administratif, kepastian hukum, dan kepercayaan publik tidak selalu bertemu pada satu titik.

Putusnya Rantai Komando Akal Sehat

Saya melihat polemik ijazah ini sebagai cermin dari persoalan yang lebih besar: melemahnya rantai komando akal sehat terdidik dalam kehidupan berbangsa.

Yang dimaksud bukan hierarki orang-orang pintar yang memerintahkan masyarakat untuk menerima suatu kebenaran. Melainkan kesinambungan penalaran, dari fakta menuju pembuktian, dari pembuktian menuju kesimpulan, dan dari kesimpulan menuju pertanggungjawaban.

Sebuah ijazah merupakan benda konkret. Ada dokumennya, ada

penerbitnya, ada arsipnya, dan ada prosedur untuk memeriksanya.

Jika terhadap sesuatu yang konkret saja kita mengalami kesulitan membangun kepastian bersama, bagaimana ketika bangsa ini harus mempercakapkan persoalan yang jauh lebih abstrak: demokrasi, keadilan, kesejahteraan, dan masa depan peradaban?

Di sinilah kerja intelektual diperlukan.

Kerja intelektual dalam kehidupan berbangsa setidaknya berlangsung dalam dua wilayah: Responsif, yakni memahami persoalan yang sedang dihadapi dan menemukan jalan keluarnya; Antisipatif, yakni memperhitungkan persoalan yang mungkin muncul akibat jalan keluar tersebut, termasuk tantangan yang akan dihadapi bangsa dalam beberapa dasawarsa mendatang.

Kedua wilayah itu tidak dapat dipisahkan. Sebab, penyelesaian suatu persoalan hampir selalu mempunyai konsekuensi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ISLAM

Kabut Asap Karhutla Membawa Petaka: Ketika Udara yang Allah Ciptakan Gratis Dijadikan Racun oleh Tangan Manusia

Oleh Darin Abu Hanifah · 15 Okt, 08:30 WIB



Seorang pengemudi ojek online (ojol) berusia paruh baya duduk di atas sepeda motornya, mengenakan helm hijau tua dan masker kain berwarna biru yang menutupi hidung dan

Dari pengemudi ojol di Palembang hingga guru di Kalimantan Selatan — ketika napas terakhir mereka tersedak oleh kabut asap, siapa yang bertanggung jawab atas nyawa-nyawa ini?

Oleh: Hanny N

DA sesuatu yang sangat salah ketika manusia harus membayar untuk mendapatkan udara bersih di negeri sendiri. Ketika anak-anak tidak bisa bermain di luar rumah karena langit berwarna oranye pekat. Ketika lansia terbaring di rumah sakit karena sesak napas yang tak kunjung reda. Dan ketika seorang pengemudi ojol di Sumatera Selatan serta seorang guru di Kalimantan Selatan tiba-tiba sesak napas dan meninggal — diduga akibat kabut asap karhutla yang telah meracuni paru-paru mereka selama berbulan-bulan.

Ini bukan bencana alam. Ini adalah bencana manusia yang berulang setiap tahun seperti musim yang sudah dijadwalkan. Empat bulan berturut-turut, Indeks Kualitas Udara (IKU) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan berada pada fase "membahayakan" — level tertinggi yang berarti setiap orang, termasuk yang sehat sekalipun, akan mengalami dampak kesehatan yang serius. Bagi kelompok rentan yang memiliki penyakit bawaan seperti asma, bronkitis, atau penyakit jantung, kondisi ini sama dengan hukuman mati perlahan.

Tapi di mana negara? Di mana sistem pengelolaan hutan yang seharusnya melindungi rakyatnya? Dan mengapa setiap tahun kita hanya bisa pasrah melihat langit menghitam, sementara para pelaku pembakaran hutan masih bebas menguasai lahan dengan aman?

Empat Bulam Racun: Karhutla Bukan Lagi Musim, tapi Tradisi Kehancuran

Karhutla — kebakaran hutan dan lahan — bukan lagi fenomena

sporadis yang terjadi secara tidak sengaja. Ia telah menjadi tradisi tahunan yang menghantui Indonesia. Setiap musim kemarau, ribuan hektar lahan terbakar. Asap tebal mengepul ke udara, menyebar ke Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Thailand. Dan setiap tahun pula, nyawa-nyawa melayang — bukan karena api yang langsung membakar, tapi karena asap yang perlahan meracuni.

Empat bulan dalam kondisi darurat udara berarti anak-anak tumbuh dengan paru-paru yang rusak sebelum sempat berkembang sempurna. Lansia terbaring lemah di rumah, terpaksa membeli oksigen sendiri karena fasilitas kesehatan pemerintah tidak mampu menampung. Pekerja lapangan — seperti pengemudi ojol dan guru yang menjadi korban — harus memilih antara mati kelaparan karena tidak bekerja, atau mati sesak karena bekerja di luar ruangan.

Ini adalah pilihan yang tidak manusiawi. Ini adalah pilihan yang tidak seharusnya ada di negeri yang kaya akan sumber daya alam. Tapi inilah realitas ketika negara gagal melindungi warganya dari ancaman yang sebenarnya bisa dicegah.

Kegagalan Sistem: Kapitalisme yang Membakar Hutan demi Keuntungan

Mengapa karhutla terus berulang? Jawabannya terletak pada sistem pengelolaan sumber daya alam yang dibangun di atas fondasi sekuler-kapitalistik.

Dalam sistem ini, hutan bukanlah amanah ilahi yang harus dijaga untuk kemaslahatan umat. Hutan adalah komoditas yang bisa dikonversi menjadi kebun kelapa sawit, perkebunan akasia, atau lahan pertanian industri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

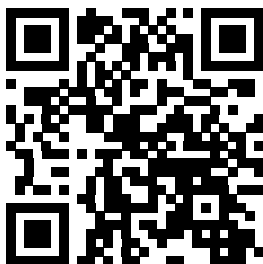
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



EKONOMI

Bank Aceh Terima Apresiasi ILO, Perkuat Komitmen Dukung UMKM Aceh Naik Kelas

Oleh Redaksi · 15 Okt, 08.00 WIB



Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas menerima apresiasi dari International Labour Organization (ILO) atas kemitraan dan kontribusi Bank Aceh Syariah dalam Proyek Promise II Impact periode 2023–2026. Apresiasi tersebut diserahkan oleh Project Manager of PROMISE II IMPACT International Labour Organization, Djauhari Sitorus dalam kegiatan Penutupan Promise II Impact Fase II

JAKARTA – Bank Aceh menerima apresiasi dari International Labour Organization (ILO) atas kemitraan dan kontribusinya dalam Proyek Promise II Impact periode 2023–2026.

Apresiasi tersebut diserahkan oleh Project Manager of PROMISE II IMPACT International Labour Organization, Djauhari Sitorus dan diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, dalam kegiatan Penutupan Promise II Impact Fase II dan Peluncuran Promise Impact Fase III di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Jakarta, Selasa (13/10/2026) kemarin.

Apresiasi ini menjadi pengakuan atas kontribusi Bank Aceh dalam mendukung penguatan inklusi keuangan, pengembangan kapasitas usaha, serta pertumbuhan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat Aceh, khususnya pelaku UMKM, program Promise II Impact menjadi bagian dari upaya memperluas kesem-

tan untuk mengembangkan usaha melalui peningkatan literasi keuangan, perbaikan pengelolaan bisnis, digitalisasi, dan akses terhadap layanan keuangan formal.

Melalui kolaborasi dengan ILO yang didukung oleh Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Bank Aceh turut mendukung pengembangan ekosistem usaha nilam di Aceh.

Komoditas ini memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam rantai usahanya.

Dukungan tersebut diwujudkan antara lain melalui pelatihan keuangan dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM di Bank Aceh.

Materi pelatihan mencakup pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan sederhana, pemasaran, pengembangan strategi produk, serta penguatan jejaring bisnis.

Pendampingan juga dilakukan untuk membantu pelaku usaha

meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis secara lebih terarah.

Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, menyampaikan bahwa penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara perbankan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Bagi Bank Aceh, mendukung UMKM bukan hanya tentang membuka akses pembiayaan, tetapi juga membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas, memperkuat pengelolaan bisnis, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Kami berharap upaya ini dapat membuka lebih banyak peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Fadhil Ilyas.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, UMKM diharapkan semakin mampu mengelola usaha secara profesional, meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan mengembangkan peluang kerja bagi masyarakat.

Bank Aceh memandang pengembangan UMKM tidak hanya sebatas penyediaan layanan keuangan, tetapi juga upaya membangun kemandirian dan daya saing pelaku usaha.

Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

Apresiasi dari ILO ini semakin memperkuat komitmen Bank Aceh untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, Bank Aceh berharap sinergi dalam pengembangan UMKM dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak pelaku usaha yang tumbuh, naik kelas, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

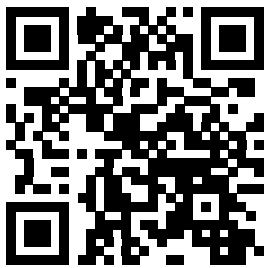
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia